



**BAHAN LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN
2023**

**BAPPEDA PROVINSI
SUMATRA BARAT**
JL. Khatib Sulaiman no.1
Padang

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,



**Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750502 199903 1 004**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN	1
1.2 DATA UMUM DAERAH	7
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	73
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	73
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	73
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	75
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	112
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	114
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	116
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	116
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	123
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	125
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	130
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI TA 2022	132
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIDEKONSENTRASIKAN	132
1. Identifikasi Dekonsentrasi Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	
3.2. HAMBATAN/ PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	135
1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Dana Dekonsentrasi Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	
BAB IV PENUTUP	137

DAFTAR TABEL

1.1. Hubungan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	4
1.2. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	8
1.3. Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 - 2023	11
1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan e-KTP Tahun 2023	12
1.5. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Maret 2018 – Maret 2023	14
1.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Maret 2018 – Maret 2023	16
1.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	17
1.8 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Agustus 2021 – Agustus 2023	19
1.9 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kondisi Agustus 2021– Agustus 2023 Di Provinsi Sumatera Barat	20
1.10 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2019- Agustus 2023 (Persen)	21
1.11 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Februari 2021– Februari 2023 (Persen)1	23
1.12 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023	24
1.13 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2023	25
1.14 IPM Menurut Provinsi se Indonesia dan IPM Rata-Rata Nasional	26
1.15 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera	

Barat Tahun 2018- 2023	27
1.16 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018-2023	28
1.17 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	30
1.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK) Tahun 2018-2022 (%)	32
1.19 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Provinsi Sumatera Barat, 2018-2022 (Persen)	34
1.20 Laju Pertumbuhan dan Distribusi Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (persen)	37
1.21 Nilai Ekspor Asal Sumatera Barat menurut Negara Tujuan Desember 2022–Desember 2023	40
1.22 Nilai Ekspor Asal Sumatera Barat menurut Sektor Desember 2022 Desember 2023	41
1.23 Nilai Impor Sumatera Barat menurut Negara Asal Desember 2022 –Desember 2023	42
1.24 Nilai Impor Sumatera Barat menurut Golongan Barang Desember 2022 Desember 2023	43
1. 25 TPK Hotel Bintang menurut Klasifikasi Bintang di Sumatera Barat	45
1.26 TPK Hotel Nonbintang menurut Kelompok Kamar di Sumatera Barat	47
1.27 Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia pada Hotel Bintang di Sumatera Barat	48
1.28 Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	48
1.29 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 20223	53
2.1 Capaian Kinerja Sasaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja	74
2.2 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran	75
2.3 Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan	107

2.4 Kebijakan Strategis Bappeda Provinsi Sumbar Tahun 2023	114
2.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	116
2.6 Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	122
2.7 Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	124
3.1 Alokasi Anggaran dan Realisasi Dekonsentrasi Tahun 2023	131

DAFTAR GRAFIK

1.1 Persentase Penggunaan Lahan terhadap Luasan Wilayah Sumatera Barat	9
1.2 Peta wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat	11
1.3 PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2022	31
1.4 Perkembangan Rata-rata Pengeluaran perkapita Sumatera Barat (Rp/bln), 2021-2022	37
1.5 Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Sumatera Barat Menurut Tipe Daerah, 2022	38
1.6 Perkembangan Ekspor Asal Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023	39
1.7 Struktur Nilai Ekspor, Januari-Desember 2022 dan 2023	41
1.8 Perkembangan Impor Tahun 2021 – 2023	42
1.9 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman ke Sumatera Barat Januari 2021 - Oktober 2023	44
1.10 Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di Sumatera Barat Januari 2021 - Oktober 2023	45
1.11 Perkembangan TPK Hotel Berbintang menurut Klasifikasi Bintang di Sumatera Barat, Oktober 2022 - Oktober 2023	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN

1. VISI

a. Jangka Panjang

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang akan dicapai dua puluh tahun mendatang adalah “Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia Yang Agamis Pada Tahun 2025”.

b. Jangka Menengah

Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021-2026 sebagai gambaran tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah : “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa

dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. Pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

2. MISI

a. Jangka Panjang

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah jangka panjang Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”,
- 2) Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik,

- 3) Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,
- 4) Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,
- 5) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

b. Jangka Menengah

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
- 2) Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
- 3) Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- 4) Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital
- 5) Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
- 6) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
- 7) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021-2026

Dalam memberikan arah kebijakan dan saran pokok RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 pada periode keempat ini, visi dan misi Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 selanjutnya dijabarkan dalam tujuan sasaran pembangunan jangka menengah. Penyusunan dan perumusan tujuan dan sasaran ini merupakan operasionalisasi dari visi dan misi pembangunan jangka menengah sehingga menjadikan kebijakan-kebijakan pembangunan lebih terarah dalam implementasinya.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sumatera Barat 2021-2026 yang mengemban 7 (tujuh) misi dijabarkan menjadi 7 (tujuh) tujuan dan 27 sasaran, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		2. Menurunnya prevalensi stunting
		3. Meningkatnya kualitas Pendidikan
		4. Meningkatnya daya saing masyarakat
Misi 2: Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	1. Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat.	1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK
		2. Meningkatnya Budaya Literasi
		3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan nilai tambah dan	1. Meningkatkan kesejahteraan petani	1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura,

MISI	TUJUAN	SASARAN
produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		3. Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	1. Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1. Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		3. Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		4. Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		5. Meningkatnya pertumbuhan investasi
		6. Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		2. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi
		2. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi

MISI	TUJUAN	SASARAN
		bencana
		3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	1. Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Sejalan dengan Visi Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yakni : “Peningkatan Produktifitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi”.

Tema RKPD ini didasari dengan beberapa asumsi peningkatan produktifitas beberapa sektor penunjang ekonomi sebagai dasar pertimbangan, antara lain :

1. Kontribusi lapangan usaha sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat pada Tahun 2021 sebesar 21,71% dan merupakan sektor terbesar, namun hanya memiliki daya ungkit terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,19% dari total Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (BPS, Tahun 2022)
2. Gabungan kontribusi sektor perdagangan dan sektor industri pada PDRB Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar 24,58 % namun memiliki daya ungkit terhadap laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,14% untuk sektor

perdagangan dan sebesar 3,8 % untuk sektor industri pengolahan. (BPS, Tahun 2022)

3. Sektor pariwisata merupakan sektor strategis untuk dikembangkan karena Sumatera Barat memiliki potensi alam dan budaya serta kuliner yang cukup menarik bagi para wisatawan domestik, sehingga intervensi prioritas pada sektor ini akan memberikan dampak positif bagi beberapa sektor lainnya seperti sektor industri rumah tangga, sektor lapangan usaha makan minum, pelayanan akomodasi serta perdagangan terutama yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sehingga dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor diatas dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemic covid, serta upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemi covid yang dititik beratkan dengan tetap meningkatkan jumlah capaian vaksinasi kedua dan booster. 2. pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana amanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 3. pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja daerah (IKD) RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. . pencapaian terhadap target kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021-2026.. 5. dukungan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat dampak bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

1.2. Data Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

Secara Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 00 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 30 30' Lintang Selatan (LS), dan 980 36' sampai 1010 53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat $\pm 42.012,89 \text{ km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ km}^2$, dengan panjang pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ km}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm 1.003 \text{ km}$, sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ km}$.

Perairan laut Sumatera Barat memiliki 220 pulau-pulau kecil dengan jumlah pulau terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 115 pulau. Secara administratif, wilayah Sumatera Barat berbatasan sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.

Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu km^2 atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu $23,0 \text{ km}^2$ (0,05%). Wilayah Sumatera Barat juga memiliki 179 kecamatan, 230 kelurahan, 803 nagari, dan 126 desa, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam berikut :

Tabel 1.2
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

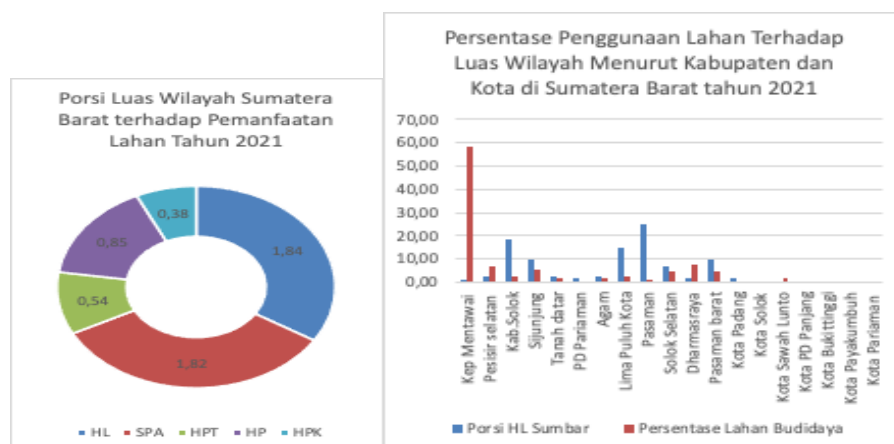
No	Kabupaten/Kota	Luas Wlayah (km^2)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
1.	Kab. Kep. Mentawai	6.011,35	10	-	-	43
2.	Kab. Pesisir Selatan	5.749,89	15	-	182	-
3.	Kab. Solok	3.738,00	14	-	74	-
4.	Kab. Sijunjung	3.130,40	8	-	61	1
5.	Kab. Tanah Datar	1.336,10	14	-	75	-
6.	Kab. Padang Pariaman	1.332,51	17	-	103	-
7.	Kab. Agam	1.804,30	16	-	82	-

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
8.	Kab. Lima Puluh Kota	3.571,14	13	-	79	-
9.	Kab. Pasaman	3.947,63	12	-	37	-
10.	Kab. Solok Selatan	3.346,20	7	-	39	-
11.	Kab. Dharmasraya	2.961,13	11	-	52	-
12.	Kab. Pasaman Barat	3.887,77	11	-	19	-
13.	Kota Padang	693,66	11	104	-	-
14.	Kota Solok	71,29	2	13	-	-
15.	Kota Sawahlunto	231,93	4	10	-	27
16.	Kota Padang Panjang	23,00	2	16	-	-
17.	Kota Bukittinggi	25,24	3	24	-	-
18.	Kota Payakumbuh	85,22	5	47	-	-
19.	Kota Pariaman	66,13	4	16	-	55
	Jumlah	42.012,89	179	230	803	126

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka

Luasan wilayah Sumatera Barat di atas jika dikaitkan dengan keberadaan lahan lindung dan suaka perlindungan alam, serta penggunaan lahan untuk produksi, ternyata persentase hutan lindung masih dominan di setiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Luasan hutan lindung paling dominan terdapat pada Kabupaten Pasaman mencapai 25,32% dari total luas Sumatera Barat, kemudian oleh Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota masing masing mencapai 18,76% dan 15,05%.

Gambar 1.1
Persentase Penggunaan Lahan terhadap Luasan Wilayah Sumatera Barat



Gambar atas memperlihatkan bahwa porsi penggunaan lahan Sumatera Barat didominasi oleh hutan lindung dan lahan suaka alam dan perlindungan alam, sedangkan lahan untuk hutan produk dan hutan produksi yang dapat dikonversi, relatif lebih kecil porsinya dari luasan wilayah yang ada. Artinya, tekanan terhadap penggunaan lahan ini akan semakin tinggi, oleh sebab itu, pertimbangan kelestarian lingkungan menjadi sangat penting.

Letak geografis Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 25,350C dan rata-rata kelembaban udara yang tinggi yaitu 83,79% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 975,19 mb.

Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, Sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak antara 98° 36'-101° 53' Bujur Timur dan 0° 54' Lintang Utara sampai dengan 3° 30' Lintang Selatan, dengan luas daratan $\pm 42.297,30 \text{ Km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ Km}^2$ dengan panjang garis pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ Km}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm 1.003 \text{ Km}$ sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ Km}$. Perairan laut ini memiliki 180 pulau-pulau besar dan kecil.

Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah termanfaatkan untuk budi daya tercatat sebesar 23.190,11 Km^2 atau sekitar 54,83% dari seluruh kawasan. Sumatera Barat juga memiliki empat danau besar, yaitu Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Di atas, dan Danau Dibawah. Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung yang terdapat pada Kabupaten/Kota. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 mdpl yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat. Peta administrasi Provinsi Sumatera Barat seperti Gambar berikut :

Gambar 1.2

Peta wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan Sensus Penduduk, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebanyak 5.610.859 jiwa, mengalami peningkatan sebanyak 351.331 jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu 5.259.528 jiwa.

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

Tabel 1.3

**Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018 – 2023**

KABUPATEN /KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KABUPATEN						
Kep.Mentawai	90.373	92.021	87.623	88.389	89.401	93.313
Pesisir Selatan	460.716	463.923	504.418	509.618	516.518	524.608
Solok	371.105	373.414	391.497	394.237	397.829	405.712
Sijunjung	233.810	237.376	235.045	237.313	240.317	242.188
Tanah Datar	347.407	348.219	371.704	373.693	376.276	378.309

KABUPATEN /KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Padang Pariaman	413.272	415.613	430.626	433.018	436.129	313.454
Agam	487.914	491.282	529.138	534.202	540.905	527.451
Lima Puluh Kota	379.514	382.817	383.525	385.634	388.375	395.307
Pasaman	278.480	281.211	299.851	303.103	307.425	306.616
Solok Selatan	168.411	171.075	182.027	184.854	188.649	183.177
Dharmasraya	241.571	247.579	288.591	231.217	234.713	234.509
Pasaman Barat	435.612	443.722	431.672	436.313	442.479	441.773
KOTA						
Padang	939.112	950.871	909.040	913.448	919.145	928.541
Solok	69.776	71.010	73.438	74.469	75.850	79.703
Sawahlunto	61.898	62.524	65.138	65.687	66.413	68.054
Padang Panjang	52.994	53.693	56.311	56.971	57.850	61.559
Bukittinggi	128.783	130.773	121.028	121.588	122.311	135.489
Payakumbuh	133.703	135.573	139.576	141.184	143.325	144.272
Pariaman	87.626	88.501	94.224	95.294	96.719	99.484
SUMBAR	5.382.07	5.441.19	5.534.47	5.580.23	5.640.62	5.701.54
	7	7	2	2	9	5

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2015-2025 Hasil SUPAS2015, BPS

Pada umumnya jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dicermati pada tahun

2018 mencapai 5.382.077 jiwa, pada tahun 2019 sudah mencapai 5.441.197 jiwa dan pada tahun 2020 mencapai 5.534.472 jiwa, pada tahun 2021 5.580.232 jiwa dan pada tahun 2022 mencapai 5.640.629 jiwa dan 5.701.545 jiwa pada tahun 2023.

Berdasarkan data BPS bahwa pada tahun 2022, jumlah penduduk paling banyak berada pada Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Padang Pariaman merupakan 5 (lima) daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Barat sedangkan Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang relatif paling kecil. Bonus demografi Sumatera Barat ini perlu dicermati sebagai suatu peluang yang cukup menjanjikan, namun bisa berefek negatif bila tidak disikapi secara bijak.

Sedangkan jumlah penduduk Sumatera Barat Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan e-KTP adalah sebanyak 5.701.545 jiwa.

Sedangkan untuk data kependudukan yang disusun Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap saat dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dikonsolidasi dan divalidasi oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB) didapat jumlah penduduk Sumatera Barat Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan e-KTP adalah sebanyak 5.701.545 jiwa dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan e-KTP Tahun 2023

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH
KABUPATEN		
1	Pesisir Selatan	524.608
2	Solok	405.712
3	Sijunjung	242.188
4	Tanah Datar	378.309
5	Padang Pariaman	313.454
6	Agam	527.451
7	Lima Puluh Kota	395.307
8	Pasaman	306.616
9	Kep. Mentawai	93.313
10	Dharmasraya	234.509
11	Solok Selatan	183.177
12	Pasaman Barat	441.773
KOTA		
13	Padang	928.541
14	Solok	79.703
15	Sawahlunto	68.054
16	Padang Panjang	61.559
17	Bukittinggi	135.489

18	Payakumbuh	144.272
19	Pariaman	99.484
Sumatera Barat		

Sumber Data : Buku Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Semester I Tahun 2023

3. Kondisi Kemiskinan

Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dan dari tahun ke tahun, dan ukuran garis kemiskinan antar daerah dan antar Kabupaten/Kota juga saling berbeda serta juga terjadi peningkatan garis kemiskinan di Sumatera Barat, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Maret 2018 – Maret 2023

TAHUN	GARIS KEMISKINAN (RP/KAPITA/BULAN)			JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
	MAKANAN	NON MAKANAN	TOTAL		
PERKOTAAN					
Maret 2018	356.907	139.235	496.142	114.840	4,86
Sept 2018	367.319	140.238	507.557	125.580	4,99
Maret 2019	382.490	143.519	526.008	121.350	4,76
Sept 2019	402.124	149.242	551.366	120.580	4,71
Maret 2020	411.369	151.198	562.567	128.120	4,97
Sept 2020	413.073	152.458	565.531	141.310	5,22

TAHUN	GARIS KEMISKINAN (RP/KAPITA/BULAN)			JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
	MAKANAN	NON MAKANAN	TOTAL		
Maret 2021	424.106	156.831	580.937	145.580	5,30
Sept 2021	431.008	161.294	592.302	134.530	4,83
Maret 2022	453.326	169.253	622.579	137.610	4,95
Sept 2022	490.322	178.321	668.643	140.330	4,90
Maret 2023	501.157	181.358	682.515	133.790	7,23
PEDESAAN					
Maret 2018	369.087	91.162	460.249	242.290	8,07
Sept 2018	370.529	95.901	466.430	227.660	7,90
Maret 2019	382.217	101.722	483.939	226.870	7,88
Sept 2019	401.904	108.552	510.457	222.510	7,69
Maret 2020	415.694	112.136	527.830	216.119	7,43
Sept 2020	416.419	113.254	529.673	223.470	7,83
Maret 2021	438.205	117.976	556.181	225.090	7,91
Sept 2021	444.693	121.531	566.224	205.390	7,23
Maret 2022	470.942	127.489	598.431	197.600	6,86
Sept 2022	500.796	138.150	638.946	203.490	7,20
Maret 2023	512.376	140.333	652.709	206.570	4,67
KOTA + DESA					
Maret 2018	364.235	112.319	476.554	357.130	6,65
Sept 2018	369.207	116.426	485.633	353.240	6,55
Maret 2019	382.233	121.319	503.652	348.220	6,42
Sept 2019	402.003	127.697	529.700	343.090	6,29
Maret 2020	413.832	130.483	544.315	344.230	6,28
Sept 2020	414.949	132.292	547.240	364.790	6,56
Maret 2021	431.644	137.059	568.703	370.670	6,63
Sept 2021	438.308	141.237	579.545	339.930	6,04
Maret 2022	462.910	148.030	610.941	335.210	5,92
Sept 2022	495.824	158.370	654.194	343.820	6,04
Maret 2023	507.000	160.925	667.925	340.370	5,95

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2023

Secara umum, pada periode Maret 2018 – Maret 2023, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah dapat ditekan cukup signifikan dari 357.130 jiwa (Maret 2018), menjadi 340.370 jiwa (Maret 2023). Secara persentase juga mengalami penurunan dari 6,65% (Maret 2018) menjadi 5,95% (Maret 2023). Jika dilihat capaian pada tahun 2023 pada keadaan September 2022 ke Maret 2023 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 6,04% menjadi 5,95% atau turun tipis sebesar 0,09%, dan penurunan jumlah penduduk miskin dari 343.820 jiwa pada September 2022 menjadi 340.370 jiwa di Maret 2023 atau turun sebesar 3.450 jiwa.

Tabel 1.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Maret 2018 – Maret 2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
Maret 2017	113.010	251.500	364.510	5,14	8,1	6,87
Sept 2017	114.590	245.410	359.990	5,11	7,94	6,75
Maret 2018	114.840	242.290	357.130	4,86	8,07	6,55
Sept 2018	125.580	227.660	353.240	4,99	7,90	6,55
Maret 2019	121.350	226.870	348.220	4,76	7,88	6,42
Sept 2019	120.580	222.510	343.090	4,71	7,69	6,29
Maret 2020	128.120	216.110	344.230	4,97	7,43	6,28
Sept 2020	141.310	223.470	364.790	5,22	7,83	6,56
Maret 2021	145.580	225.090	370.670	5,30	7,91	6,63
Sept 2021	134.530	205.390	339.930	4,83	7,23	6,04
Maret 2022	137.610	197.600	335.210	4,95	6,86	5,92
Sept 2022	140.330	203.490	343.820	4,90	7,20	6,04
Maret 2023	133.790	206.570	340.370	7,23	4,67	5,95

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No. 05/01/13/Th. XXV, 17 Januari 2023

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)

TAHUN	KOTA	DESA	KOTA+DESA
P1			
Maret 2016	0,752	1,334	1,096
September 2016	1,038	1,180	1,122
Maret 2017	0,752	1,175	1,000
September 2017	0,599	1,275	0,990
Maret 2018	0,663	1,329	1,035
Sept 2018	0,884	1,025	0,959
Maret 2019	0,771	1,093	0,942
Sept 2019	0,538	0,993	0,779
Maret 2020	0,742	1,068	0,915
Sept 2020	0,803	1,171	0,992
Maret 2021	0,866	1,214	1,043
September 2021	0,742	1,177	0,962
Maret 2022	0,647	0,956	0,804
September 2022	0,782	0,943	0,862
Maret 2023	0,687	0,956	0,821
P2			
Maret 2016	0,153	0,304	0,242
September 2016	0,249	0,299	0,278

Maret 2017	0,157	0,278	0,228
September 2017	0,107	0,324	0,233
Maret 2018	0,142	0,320	0,242
Sept 2018	0,212	0,214	0,213
Maret 2019	0,196	0,225	0,211
Sept 2019	0,096	0,191	0,147
Maret 2020	0,164	0,223	0,201
Sept 2020	0,242	0,278	0,261
Maret 2021	0,199	0,282	0,241
September 2021	0,141	0,308	0,225
Maret 2022	0,131	0,196	0,164
September 2022	0,168	0,180	0,174
Maret 2023	0,154	0,200	0,177

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pada periode September 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah 0,804 naik 0,017 poin menjadi 0,821 pada Maret 2023. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan sebesar 0,003 dari 0,174 pada September 2022 menjadi 0,177 pada Maret 2023.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2022. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 0,647 sementara di daerah perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,956, nilai ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di perdesaan memiliki rata-rata (gap) pengeluaran dengan garis kemiskinan yang lebih besar dibandingkan penduduk miskin perkotaan. Kondisi penduduk miskin di perkotaan sedikit lebih baik, dilihat dari nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang lebih kecil dibanding penduduk perdesaan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan pada Maret 2022 sebesar 0,196 dibandingkan perkotaan 0,131 di periode yang sama. Terjadi penurunan indeks keparahan kemiskinan di perdesaan sebesar 0,112 poin yakni dari 0,308 pada September 2021 menjadi 0,196 pada Maret 2022. Begitu juga di perkotaan juga terjadi penurunan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,010 poin yakni dari 0,141 pada September 2021 menjadi 0,131 pada Maret 2022. Artinya, diperlukan usaha yang lebih besar untuk mengentaskan penduduk perdesaan dari kemiskinan daripada di perkotaan.

4. Kondisi Ketenagakerjaan

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 2.868,27 ribu orang penduduk yang bekerja dan 180,11 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021 terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 106,88 ribu orang (3.87%). Penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 106,72 ribu orang (4.13%) dan pengangguran juga naik sebanyak 0,16 ribu orang (0.09%).

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 68.41 persen, turun 0,24 persen poin dibanding Agustus 2021.

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Agustus 2021 – Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Agus 2021–Agus 2022		Perubahan Agus 2022–Agus 2023	
	Ribu Orang			Orang	Persen	Orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	4 077,63	4.138,95`	4.344,99	60,85	1,51	61,32	1,50
Angkatan Kerja	2 761,39	2.868,27	3.024,43	-10,74	-0,39	106,88	3,87
- Bekerja	2 581,44	2.688,16	2,844,93	-0,08	0,06	106,72	4,13
- Pengangguran	179,95	180,11	179,50	-10,66	-5,59	0,16	0,09
Bukan Angkatan Kerja	1 316,24	1.270,68	1.320,56	71,59	5,75	-45,56	-3,46
Persen				Persen Poin			
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,52	6,28	5,94	-0,36		-0,24	

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,72	68,41	69,61	-1,29	1,58
---	-------	-------	-------	-------	------

*Sumber : Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Pro.Sumbar Edisi Bulan Desember 2023
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2022 sebesar 6,28 persen turun 0,24 poin bila dibandingkan bulan Agustus 2021 (6,52 persen).

Tabel 1.9
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kondisi Agustus 2021– Agustus 2023
Di Provinsi Sumatera Barat

No	Status Pekerjaan Utama	Agustus 2021		Agustus 2022		Agustus 2023	
		(Ribuan Org)	%	(Ribuan Org)	%	(Ribuan Org)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	895,67	34,70	939,75	34,96	964,49	33,90
2	Pertambangan dan Penggalian	27,80	1,08	38,35	1,43	35,49	1,25
3	Industri Pengolahan	231,07	8,95	230,78	8,58	245,57	8,63
4	Pengadaan Listrik, Gas, dan Air Minum	9,27	0,36	12,58	0,47	13,03	0,46
5	Konstruksi	132,23	5,12	117,99	4,39	130,22	4,58
6	Perdagangan Besar dan Eceran	514,51	19,93	543,34	20,21	529,29	18,60
7	Transportasi dan Pergudangan	78,28	3,03	89,10	3,31	110,68	3,89

No	Status Pekerjaan Utama	Agustus 2021		Agustus 2022		Agustus 2023	
		(Ribuan Org)	%	(Ribuan Org)	%	(Ribuan Org)	%
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192,10	7,44	212,59	7,91	237,85	8,36
9	Informasi dan Komunikasi	15,71	0,61	18,41	0,68	24,95	0,88
10	Jasa Keuangan, Asuransi dan Real Estat	27,07	0,73	24,72	0,92	25,65	0,90
11	Jasa Perusahaan	28,97	1,12	32,74	1,22	44,78	1,57
12	Administrasi Pemerintahan	129,05	5,00	122,60	4,56	140,15	4,93
13	Jasa Pendidikan	169,27	6,56	169,70	6,31	187,28	6,58
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	58,39	2,26	55,04	2,05	55,01	1,93
15	Jasa Lainnya	72,05	2,79	80,49	2,99	100,50	3,53
TOTAL		2 581,52	2 581,44	100	2688,16	2844,93	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan data BPS bahwa terdapat 3 lapangan pekerjaan utama di Sumatera Barat yang paling banyak menyerap tenaga kerja yakni Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Sektor Industri Pengolahan.

Tabel 1.10

**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Agustus 2021 – Agustus 2023**

No	Status Pekerjaan Utama	Agustus 2021		Agustus 2022		Agustus 2023	
		(Ribuan Orang)	%	(Ribuan Orang)	%	(Ribuan Orang)	%
A.	Kegiatan Formal	909,32	35,23	933,87	34,74	1018,73	35,81

1	Buruh/Karyawan/ Pegawai	820,78	31,80	840,70	31,27	897,00	31,53
2	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	88,54	3,43	93,17	3,47	121,73	4,28
B.	Kegiatan Informal	1672,13	64,77	1754,29	65,25	1826,20	64,19
3	Berusaha Sendiri	543,68	21,06	653,86	24,32	694,09	24,40
4	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	429,02	16,62	433,37	16,12	469,21	16,49
5	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	395,40	15,32	387,30	14,41	363,31	12,77
6	Pekerja Bebas di Pertanian	174,58	6,76	159,22	5,92	166,42	5,85
7	Pekerja Bebas di Non Pertanian	129,45	5,01	120,54	4,48	133,17	4,68
TOTAL		2 581,44	100,00	2.688,16	100,00	2844,93	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada Agustus 2022, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 31,27 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap yaitu sebesar 3,47 persen.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 933,87 ribu orang (34,74 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 1754,29 ribu orang (65,25 persen). Penduduk bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2022 turun sebesar 0,49 persen poin jika dibandingkan Agustus 2021, tetapi apabila dibandingkan Agustus 2020 pekerja formal naik sebesar 1,02 persen poin.

Tabel 1.11
Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi
Februari 2021– Februari 2023 (Persen)

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2021		2022		2023
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
1	SD ke bawah	3.48	4.03	2.66	4,63	3,68
2	SLTP	5.97	6.31	4.90	5,81	6,36
3	SLTA	6.88	7.71	7.52	8,47	6,09
4	SMK	7.81	8.80	11.16	6,69	11,02
5	Diploma I/II/III	11.65	8.35	12.41	6,03	6,18
6	Universitas	11.42	8.09	8.43	6,70	5,52
	JUMLAH	47,21	43,29	47,08	38,33	38,85

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari sisi tingkat Pendidikan tertinggi maka pada Februari 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka dari Diploma I/II/III merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 12,41 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 2,66 persen. Dibandingkan Februari 2021, hampir semua kategori Pendidikan mengalami penurunan kecuali SLTA, SMK dan Diploma I/II/III naik masing-masing 0,64 persen poin, 3.35 persen poin dan 0,76 persen poin.

5. Kondisi Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metode baru yang dirilis Tahun 2015, dimana IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dimana IPM menjelaskan bagaimana penduduk antara lain dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup

sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) serta standar hidup layak (*decent standard of living*).

Umur harapan hidup saat lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, yang dihitung dari sensus dan survey kependudukan.

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli.

Hasil perhitungan IPM di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan penghitungan metode baru pada Tahun 2022 adalah 73,26 dengan rincian komponen Umur Harapan Hidup saat lahir adalah 69,31 tahun, Harapan Lama Sekolah 14,10 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah 9,18 tahun dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Rp.11.130,-(Ribu/Orang/Tahun), seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.12
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2023

No	KOMPONEN IPM	SATUAN	TAHUN		
			2021	2022	2023
1	Angka Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,60	73,88	74,14
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.09	14.10	14,11
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9.07	9.18	9,28
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Orang /Th)	10.790	11.130	11.380

No	KOMPONEN IPM	SATUAN	TAHUN		
			2021	2022	2023
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT			74,56	75,16	75,64

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Peningkatan capaian IPM Sumatera Barat juga di topang dengan kenaikan IPM pada tingkat Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022, IPM tertinggi di Sumatera Barat yakni pada Kota Bukittinggi sebesar 81.42 dan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 62.19, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.13
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Tahun 2018-2023

KABUPATEN/KOTA	Indeks Pembangunan Manusia					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	60,28	61,26	61,09	61,35	62,19	65,79
Kab. Pesisir Selatan	69,40	70,08	69,90	70,03	70,84	72,74
Kab. Solok	68,60	69,08	69,08	69,24	70,02	71,92
Kab. Sijunjung	66,97	67,66	67,74	67,86	68,69	72,30
Kab. Tanah Datar	71,25	72,14	72,33	72,46	73,29	75,57
Kab. Padang Pariaman	69,71	70,59	70,61	70,76	71,63	74,54
Kab. Agam	71,70	72,37	72,46	72,57	73,29	74,44
Kab. Limapuluh Kota	69,17	69,67	69,47	69,68	70,28	72,05
Kab. Pasaman	65,60	66,46	66,64	66,77	67,41	69,85
Kab. Solok Selatan	68,45	68,94	69,04	69,23	69,71	72,24
Kab. Dharmas Raya	70,86	71,52	71,51	71,76	72,30	73,87
Kab. Pasaman Barat	67,43	68,21	68,49	68,76	69,57	72,03
Kota Padang	82,25	82,68	82,82	82,90	83,29	83,93
Kota Solok	77,89	78,38	78,29	78,41	79,23	79,66
Kota Sawah Lunto	71,72	72,39	72,64	72,88	73,73	75,91
Kota Padang Panjang	77,30	78,00	77,93	77,97	78,78	79,76
Kota Bukit Tinggi	80,11	80,71	80,58	80,70	81,42	81,88
Kota Payakumbuh	78,23	78,95	78,90	79,08	79,53	80,14
Kota Pariaman	76,26	76,70	76,90	77,07	77,65	79,76
Sumatera Barat	71,73	72,39	72,38	72,65	73,26	75,64

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan bila dibandingkan dengan IPM rata-rata Nasional Tahun 2022 maka IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 73,26 sudah lebih tinggi dibandingkan dengan IPM rata-rata Nasional yaitu sebesar 72,91, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.14
IPM Menurut Provinsi se Indonesia dan IPM Rata-Rata Nasional

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	70,60	71,19	71,90	71,99	72,18	72,80	74,70
Sumatera Utara	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00	72,71	75,13
Sumatera Barat	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65	73,26	75,64
Riau	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94	73,52	74,95
Jambi	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63	72,14	73,73
Sumatera Selatan	68,86	69,39	70,02	70,01	70,24	70,90	73,18
Bengkulu	69,95	70,64	71,21	71,40	71,64	72,16	74,30
Lampung	68,25	69,02	69,57	69,69	69,90	70,45	72,48
Kep. Bangka Belitung	69,99	70,67	71,30	71,47	71,69	72,24	74,09
Kep. Riau	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46	79,08
Dki Jakarta	80,06	80,47	80,76	80,77	81,11	81,65	83,55
Jawa Barat	70,69	71,30	72,03	72,09	72,45	73,12	74,24
Jawa Tengah	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79	73,39
Di Yogyakarta	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22	80,64	81,09
Jawa Timur	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14	72,75	74,65
Banten	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72	73,32	75,77
Bali	74,30	74,77	75,38	75,50	75,69	76,44	78,01
Nusa Tenggara Barat	66,58	67,30	68,14	68,25	68,65	69,46	72,37
Nusa Tenggara Timur	63,73	64,39	65,23	65,19	65,28	65,90	68,4
Kalimantan Barat	66,26	66,98	67,65	67,66	67,90	68,63	70,47
Kalimantan Tengah	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25	71,63	73,73
Kalimantan Selatan	69,65	70,17	70,72	70,91	71,28	71,84	74,66
Kalimantan Timur	75,12	75,83	76,61	76,24	76,88	79,68	78,20
Kalimantan Utara	69,84	70,56	71,15	70,63	71,19	71,83	72,88
Sulawesi Utara	71,66	72,20	72,99	72,93	73,30	73,81	75,04

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Tengah	68,11	68,88	69,50	69,55	69,79	70,28	71,66
Sulawesi Selatan	70,34	70,90	71,66	71,93	72,24	72,82	74,60
Sulawesi Tenggara	69,86	70,61	71,20	71,45	71,66	72,23	72,94
Gorontalo	67,01	67,71	68,49	68,68	69,00	69,81	71,25
Sulawesi Barat	64,30	65,10	65,73	66,11	66,36	66,92	69,80
Maluku	68,19	68,87	69,45	69,49	69,71	70,22	72,75
Maluku Utara	67,20	67,76	68,70	68,49	68,76	69,47	70,98
Papua Barat	62,99	63,74	64,70	65,09	65,26	65,89	67,47
Papua	59,09	60,06	60,84	60,44	60,62	61,39	63,01
Indonesia	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Salah satu komponen IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk melihat jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalankan pendidikan formal. Di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022, RLS yang tertinggi berada di Kota Padang Panjang sebesar 11,63 tahun, diikuti oleh Kota Padang 11,59 tahun, Kota Bukittinggi 11,34 tahun, dan Kota Solok 11,04 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata lama sekolahnya adalah 7,2 tahun. Kondisi rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.15.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
se-Sumatera Barat Tahun 2018-2023

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	6,95	7,08	7,09	7,20	7,20	7,76
Kab. Pesisir Selatan	8,14	8,25	8,26	8,27	8,27	8,58
Kab. Solok	7,84	7,85	7,86	7,87	7,87	7,90
Kab. Sijunjung	7,77	8,10	8,11	8,12	8,12	8,57
Kab. Tanah Datar	8,44	8,45	8,61	8,62	8,62	9,02
Kab. Padang Pariaman	7,50	7,86	7,87	7,88	7,88	8,41
Kab. Agam	8,69	8,85	8,96	8,57	8,57	9,22

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Limapuluh Kota	7,97	7,98	7,99	8,07	8,07	8,12
Kab. Pasaman	7,66	7,86	8,09	8,10	8,10	8,13
Kab. Solok Selatan	8,15	8,16	8,28	8,32	8,32	8,69
Kab. Dharmas Raya	8,25	8,46	8,47	8,55	8,55	8,71
Kab. Pasaman Barat	7,86	8,06	8,19	8,27	8,27	8,81
Kota Padang	11,33	11,34	11,58	11,59	11,59	11,62
Kota Solok	11,01	11,02	11,03	11,04	11,04	11,36
Kota Sawah Lunto	9,94	9,97	10,17	10,32	10,32	10,44
Kota Padang Panjang	11,44	11,45	11,62	11,63	11,63	11,94
Kota Bukit Tinggi	11,31	11,32	11,33	11,34	11,34	11,64
Kota Payakumbuh	10,46	10,72	10,73	10,81	10,81	10,88
Kota Pariaman	10,36	10,37	10,59	10,67	10,67	10,79
SUMATERA BARAT	8,76	8,92	8,99	9,07	9,07	9,28

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Komponen pembentukan IPM yang lain adalah Umur Harapan Hidup (UHH), yang memperlihatkan derajat kesehatan suatu masyarakat, yang dihitung dari sensus dan survey kependudukan. Di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022, UHH yang tertinggi berada di Kota Kota Bukittinggi sebesar 74,82 tahun, diikuti oleh Kota Payakumbuh 74,14 tahun dan Kota Solok 74,06 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Umur Harapan Hidup 64,93 tahun. Kondisi rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.16
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 2018-2023

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	64,49	64,68	64,73	64,73	64,93	71,06
Kab. Pesisir Selatan	70,45	70,73	70,86	70,96	71,25	73,27
Kab. Solok	67,95	68,34	68,58	68,79	69,19	72,31
Kab. Sijunjung	65,69	66,02	66,21	66,36	66,70	72,59

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Tanah Datar	69,38	69,73	69,94	70,12	70,49	74,19
Kab. Padang Pariaman	68,23	68,58	68,79	68,97	69,34	73,77
Kab. Agam	71,83	72,17	72,37	72,53	72,89	74,22
Kab. Limapuluh Kota	69,47	69,70	69,79	69,84	70,08	73,25
Kab. Pasaman	66,82	67,18	67,40	67,59	67,96	72,04
Kab. Solok Selatan	67,21	67,58	67,81	68,01	68,38	72,22
Kab. Dharmas Raya	70,73	71,10	71,33	71,53	71,90	74,04
Kab. Pasaman Barat	67,37	67,67	67,82	67,94	68,25	72,44
Kota Padang	73,35	73,57	73,65	73,69	73,93	74,94
Kota Solok	73,14	73,45	73,61	73,73	74,06	74,56
Kota Sawahlunto	69,59	69,87	70,00	70,10	70,40	73,79
Kota Padang Panjang	72,58	72,77	72,82	72,82	73,02	74,24
Kota Bukit Tinggi	73,91	74,22	74,38	74,50	74,82	75,33
Kota Payakumbuh	73,33	73,61	73,74	73,84	74,14	74,77
Kota Pariaman	69,87	70,15	70,28	70,38	70,67	74,20
SUMATERA BARAT	69,01	69,31	69,47	69,59	69,90	74,14

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Sedangkan pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli di Sumatera Barat terlihat pada tahun 2022 adalah Rp. 11.130.000 Rupiah/Orang/Tahun. Pengeluaran perkapita yang tertinggi di Sumatera Barat adalah Kota Padang sebesar Rp.14.889.000,-/Orang/Tahun, diikuti oleh Kota Payakumbuh sebesar Rp.13.687.000,-/Orang/Tahun dan Kota Bukittinggi sebesar Rp.13.586.000,-/Orang/Tahun. Sedangkan yang terendah pengeluaran perkapitanya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 6.567.000,-/Orang/Tahun. Perkembangan pengeluaran perkapita di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.17

**Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)**

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	6.211	6.429	6.281	6.321	6.567	6.891
Kab. Pesisir Selatan	9.089	9.444	9.212	9.270	9.686	9.953
Kab. Solok	10.035	10.309	10.171	10.215	10.539	10.717
Kab. Sijunjung	10.277	10.395	10.361	10.389	10.582	11.018
Kab. Tanah Datar	10.417	10.709	10.588	10.616	10.695	10.905
Kab. Padang Pariaman	10.919	11.158	10.998	11.050	11.159	11.432
Kab. Agam	9.489	9.780	9.651	9.662	10.171	10.402
Kab. Limapuluh Kota	9.500	9.842	9.596	9.668	10.035	10.285
Kab. Pasaman	8.238	8.599	8.425	8.440	8.619	8.908
Kab. Solok Selatan	10.199	10.505	10.325	10.367	10.560	10.884
Kab. Dharmas Raya	11.189	11.431	11.273	11.324	11.650	11.901
Kab. Pasaman Barat	8.979	9.180	9.047	9.089	9.381	9.538
Kota Padang	14.312	14.728	14.481	14.540	14.889	15.089
Kota Solok	11.968	12.337	12.117	12.168	12.515	12.709
Kota Sawah Lunto	9.765	10.238	10.182	10.195	10.537	10.829
Kota Padang Panjang	10.440	11.013	10.734	10.754	11.153	11.310
Kota Bukit Tinggi	13.035	13.586	13.282	13.331	13.633	13.859
Kota Payakumbuh	13.114	13.464	13.281	13.317	13.687	13.978
Kota Pariaman	12.611	12.958	12.796	12.818	13.150	13.355
SUMATERA BARAT	10.638	10.925	10.733	10.790	11.130	11.380

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2023

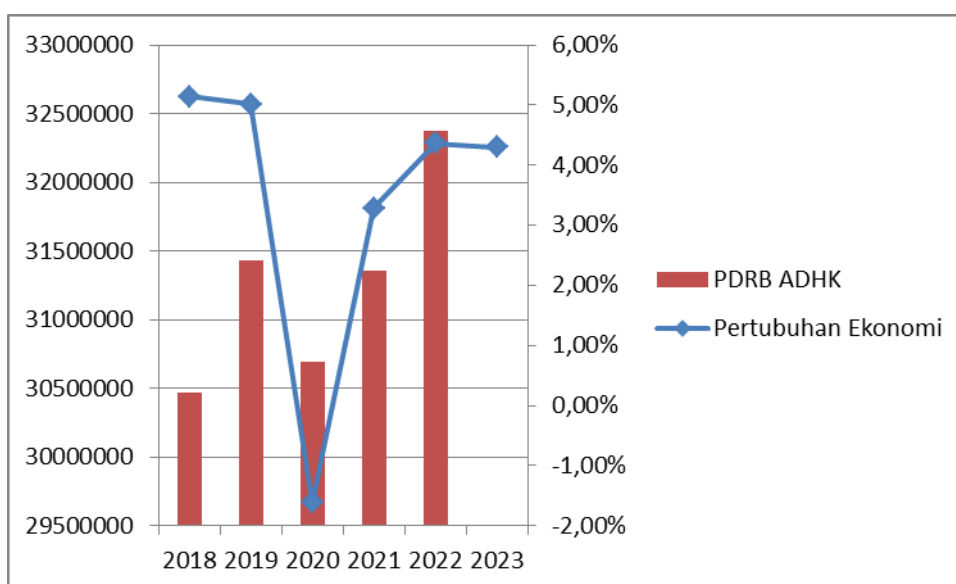
6. Kondisi Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diukur

berdasarkan pertambahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) antara 2 (dua) tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menggambarkan bagaimana capaian pembangunan suatu daerah. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari penghitungan PDRB atas dasar harga konstan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari tahun 2016- 2021 cenderung melambat, kecuali di tahun 2020 mengalami kontraksi. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama lima tahun ini trennya melambat tetapi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tidak terlalu jauh nilainya dari pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian Sumatera Barat yang sempat tumbuh 5,27% pada tahun 2016 justru terus menurun hingga mencapai angka 5,05% pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 bahkan lebih memperparah kondisi perekonomian daerah yang terkontraksi sekitar -1,6%. Kondisi perekonomian baik global maupun nasional pada tahun 2021 ternyata mengalami rebound dengan kondisi yang lebih membaik. Capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,29%, namun masih dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 3,69%,.

Grafik 1.3
PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2023

Laju Pertumbuhan PDRD Sumatera Barat menurut Lapangan usaha yang memiliki daya ungkit besar yakni Lapangan usaha sektor Jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,46%, yang kemudian Jasa lainnya sebesar 7,10%, lapangan usaha sektor Informasi dan komunikasi sebesar 6,42% dan jasa Kesehatan dan kegiatan social sebesar 5,88%. Disamping itu diakibatkan telah longgarnya ketentuan dan aturan terkait dengan pembatasan aktifitas diluar ruangan serta aktifitas di area publik dalam bentuk keramaian yang disebabkan adanya pandemic covid turut meningkatkan laju lapangan usaha sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan laju cukup signifikan sebesar 5,63%. Sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memegang kontribusi yang cukup dominan terhadap struktur PDRB Sumatera Barat sebesar 21,71% hanya memiliki laju pertumbuhan sebesar 2,19% dan Sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 15,77% hanya memiliki laju pertumbuhan sebesar 5,12%. Adapun secara lebih rinci laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.18
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK) Tahun 2018-2023 (%)

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,54	2,48	1.16	2.18	3,52	4,16
2. Pertambangan dan Penggalian	5,79	6,22	-1.31	-1.77	1,94	0,89
3. Industri Pengolahan	-0,57	-1,98	-0.54	3.68	1,74	5,04
4. Pengadaan Listrik & Gas	4,09	4,20	-6.81	3.15	3,21	5,11
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur	2,24	6,10	-1.04	5.53	4,37	-1,21

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ulang						
6. Konstruksi	7,04	8,47	-2.95	2.18	2,51	4,61
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,03	7,29	-1.14	5.12	5,60	4,15
8. Transportasi dan Pergudangan	6,47	4,75	-16.10	2.56	5,73	5,22
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,23	8,11	-15.95	5.63	15,80	9,44
10. Informasi dan Komunikasi	8,57	8,73	9.55	6.42	7,02	7,48
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,99	2,29	1.34	8.46	4,54	1,55
12. Real Estate	4,67	6,78	0.22	2.41	5,78	5,60
13. Jasa Perusahaan	5,45	6,20	-3.98	1.13	7,33	6,84
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,97	6.96	-0.59	0.86	0,89	9,63
15. Jasa Pendidikan	7,19	7,94	5.03	1.84	5,13	3,15
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,28	7,54	8.83	5.88	4,54	6,18

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17. Jasa Lainnya	7,86	7,50	-10.10	7.10	11,88	10,39
PDRB SUMATERA BARAT	5,16	5,01	-1.62	3.29	4,36	4,97

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2023

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama kurun waktu lima tahun (2017-2021) Lima lapangan usaha masih tetap mendominasi dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Industri Pengolahan dan Konstruksi. Namun besaran peranan masing-masing dari lapangan usaha tersebut berangsur-angsur mulai bergeser. Pada tahun 2021 persentase lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Konstruksi mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar 15,77 persen dan 10,20 persen. Sedangkan tiga sektor lainnya mengalami penurunan yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,71 persen); Transportasi dan Pergudangan (10,30 persen); serta Industri Pengolahan (8,81 persen).

Tabel 1.19

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Provinsi Sumatera Barat, 2018-2022 (Persen)

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	23.17	22.15	22.36	21.69	21.20

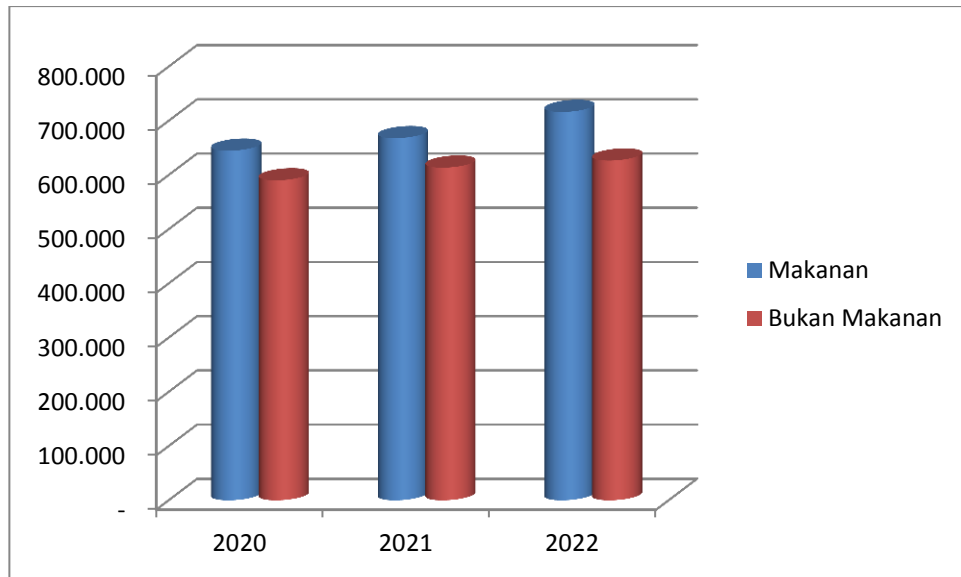
LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2018	2019	2020	2021	2022
2. Pertambangan dan Penggalian	4.27	4.30	4.27	4.19	4.09
3. Industri Pengolahan	9.10	8.38	8.64	8.79	8.54
4. Pengadaan Listrik & Gas	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0.09	0.09	0.09	0.09	0.9
6. Konstruksi	9.63	10.09	10.18	10.20	10.6
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.30	15.79	15.77	15.77	14.71
8. Transportasi dan Pergudangan	12.65	12.60	10.44	10.30	10.88
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.37	1.43	1.24	1.27	1.35
10. Informasi dan Komunikasi	5.46	5.81	6.43	6.62	6,68
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.01	2.91	3.04	3.28	3.23
12. Real Estate	1.96	2.01	2.06	2.05	2.02
13. Jasa Perusahaan	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2018	2019	2020	2021	2022
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.92	6.13	6.72	6.90	6.52
15. Jasa Pendidikan	4.20	4.35	4.71	4.64	4.62
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.39	1.42	1.62	1.69	1.65
17. Jasa Lainnya	1.93	2.00	1.88	1.95	2.05
PDRB SUMATERA BARAT	100	100	100	100	100

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2023

Perkembangan kesejahteraan penduduk dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan perkapita penduduk Sumatera Barat senilai 1.235.050 rupiah per bulan. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 1.281.658 rupiah. Proporsi pengeluaran penduduk Sumatera Barat untuk makanan masih lebih besar dari pada bukan makanan.

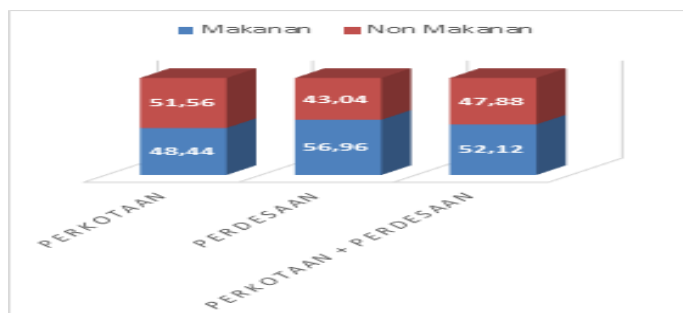
Grafik 1.4
Perkembangan Rata-rata Pengeluaran perkapita
Sumatera Barat (Rp/bln), 2021-2022



Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2023

Perkembangan tingkat kesejahteraan juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan dan non makanan, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Pada tahun 2021 persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran non makanan yakni sekitar 52,12 persen. Kalau dilihat menurut daerah kota dan desa maka terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan masih tinggi komposisinya di daerah pedesaan yakni masih sekitar 56,96 persen dan di daerah perkotaan sudah dibawah 50 persen yaitu sebesar 48,44 persen.

Grafik 1.5
Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan
di Sumatera Barat Menurut Tipe Daerah, 2022



Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2023

Dilihat dari pola distribusi penggunaan tahun 2021, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat masih merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 53,49%. Penyumbang kedua adalah pembentukan modal tetap bruto sebesar 28,62% dan ekspor luar negeri 17,36%. Laju pertumbuhan dan distribusi menurut pengeluaran Tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

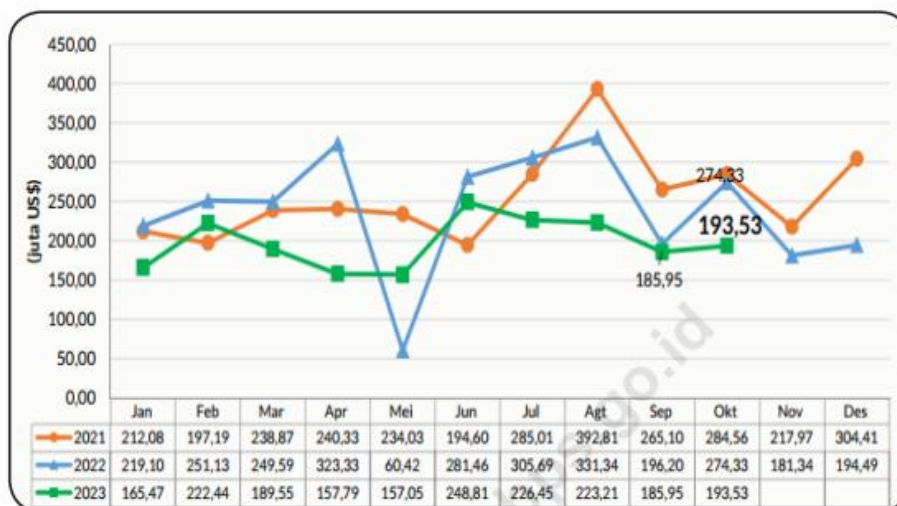
Tabel 1.20
Laju Pertumbuhan dan Distribusi Menurut Pengeluaran
Tahun 2019-2023 (persen)

Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010				Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,74	-2,47	1,97	4,41	54,41	54,09	53,88	53,49
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	11,85	-4,39	1,79	4,91	1,14	1,12	1,11	1,08
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,00	-8,64	0,15	2,77	12,58	11,84	11,53	10,12
Pembentukan	5,16	-2,70	1,80	2,26	30,11	30,00	30,30	28,62

Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010				Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Modal Tetap Bruto								
Perubahan Inventori	-	-	-	-	0,04	0,15	0,15	0,36
Ekspor Luar Negeri	-7,52	-3,31	53,53	-0,79	9,01	8,95	16,25	17,36
Impor Luar Negeri	-14,31	-53,85	59,55	2,96	2,92	1,40	2,17	3,02
Net Ekspor Barang & Jasa	-	-	-	-	-4,36	-4,73	-11,44	-8,01
PDRB SUMATERA BARAT	5,01	-1,60	3,29	4,54	100	100	100	100

Perkembangan Ekspor Asal Sumatera Barat pada Desember 2022 dengan nilai ekspor sebesar US\$194,49 juta atau naik sebesar 7,27 persen dibandingkan dengan ekspor November 2022 yang sebesar US\$181,34 juta. Ekspor asal Sumatera Barat Desember 2022 ini turun sebesar 36,11 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 1.6
Perkembangan Ekspor Asal Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023



Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Ekspor asal Sumatera Barat pada Desember 2022 dikirim ke beberapa negara tujuan dengan nilai ekspor terbesar adalah ke Pakistan sebesar US\$80,38 juta, selanjutnya ke India sebesar US\$70,42 juta dan ke Spain sebesar US\$12,20 juta.

Ekspor asal Sumatera Barat ke negara Pakistan memiliki peran yang terbesar terhadap total ekspor Sumatera Barat pada Januari-Desember 2022, yaitu sebesar 30,58 persen. Selanjutnya ekspor ke India memberikan peran sebesar 30,07 persen dan ekspor ke Bangladesh memberikan peran sebesar 7,21 persen.

Komoditas utama yang di ekspor ke Pakistan pada Desember 2022 adalah Refined palm oil. Sementara itu komoditas utama yang diekspor ke India pada Desember 2022 adalah Crude palm oil.

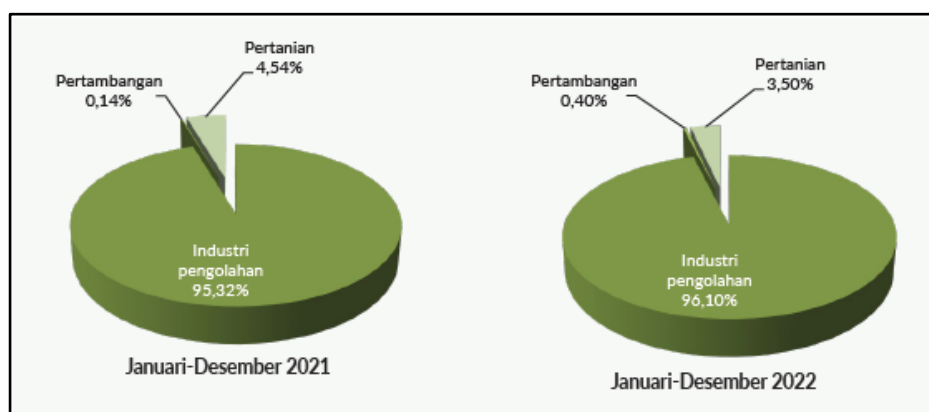
Tabel 1.21
Nilai Ekspor Asal Sumatera Barat menurut Negara Tujuan
Desember 2022–Desember 2023

Negara Tujuan	Nilai FOB (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan-Okt 2023 (%)
	Okt 2022	Sept 2023	Okt 2023	Jan-Okt 2022	Jan-Okt 2023	Okt 2023 thd Sept 2023	Okt 2023 thd Okt 2022	Jan-Okt 2023 thd Jan-Okt 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 India	75,02	51,89	57,65	733,55	607,94	11,11	-23,16	-17,12	30,86
2 Pakistan	59,57	42,00	43,52	740,10	542,36	3,62	-26,94	-26,72	27,53
3 Tiongkok	44,61	30,71	23,98	169,42	166,17	-21,92	-46,25	-1,92	8,43
4 Myanmar	4,93	-	22,13	113,50	98,26	-	348,53	-13,43	4,99
5 Uni Emirat Arab	0,00	0,00	10,07	0,44	10,23	20.055.647,96	2.977.763,22	2.212,42	0,52
6 Bangladesh	25,12	24,09	8,77	170,23	204,68	-63,57	-65,07	20,24	10,39
7 Jepang	8,58	6,10	7,42	75,42	77,06	21,66	-13,52	2,17	3,91
8 Amerika Serikat	8,34	3,40	6,49	145,64	61,46	91,10	-22,15	-57,80	3,12
9 Belanda	3,03	0,07	4,31	44,14	36,65	5.815,31	42,00	-16,96	1,86
10 Irak	2,30	-	4,13	5,72	4,13	-	79,59	-27,79	0,21
Total 10 Negara Tujuan	231,51	158,25	188,47	2.198,15	1.808,95	19,09	-18,59	-17,71	91,81
Lainnya	42,82	27,70	5,06	294,44	161,31	-81,72	-88,18	-45,21	8,19
Total Ekspor	274,33	185,95	193,53	2.492,59	1.970,26	4,07	-29,45	-20,96	100,00

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Struktur Nilai Ekspor Sumatera Barat pada periode Januari-Desember 2021 dan 2022 dapat dilihat pada diagram berikut :

Grafik 1.7
Struktur Nilai Ekspor, Januari-Desember 2021 dan 2022



Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Ekspor produk industri pengolahan mengalami peningkatan sebesar 11,51 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total ekspor Sumatera Barat periode Januari-Desember 2022 berada pada bearan 96,10 persen. Peranan dan perkembangan ekspor asal Sumatera Barat menurut sektor pada Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

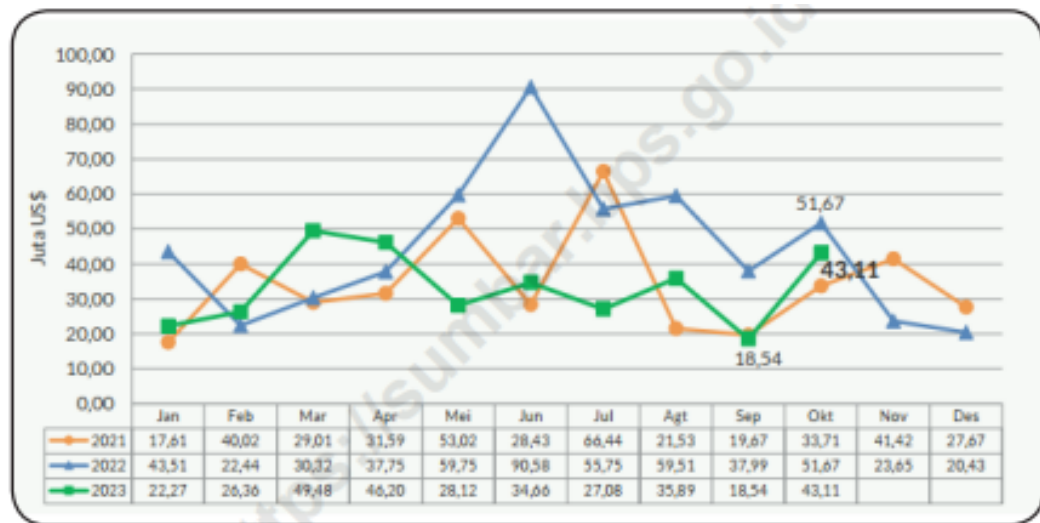
Tabel 1.22
Nilai Ekspor Asal Sumatera Barat menurut Sektor
Desember 2022–Desember 2023

Sektor	Nilai FOB (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan-Okt 2023 (%)
	Okt 2022	Sept 2023	Okt 2023	Jan-Okt 2022	Jan-Okt 2023	Okt 2023 thd Sept 2023	Okt 2023 thd Okt 2022	Jan-Okt 2023 thd Jan-Okt 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 INDUSTRI PENGOLAHAN	259,52	179,73	185,31	2.397,84	1.872,72	3,10	-28,59	-21,90	95,05
2 PERTAMBANGAN	4,73	-	-	6,75	22,29	-	-	230,06	1,13
3 PERTANIAN	10,08	6,22	8,22	87,99	75,25	32,14	-18,51	-14,49	3,82
Total Ekspor	274,33	185,95	193,53	2.492,59	1.970,26	4,07	-29,45	-20,96	100,00

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Sementara nilai impor Sumatera Barat yang tercatat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sumatera Barat selama Desember 2022 sebesar US\$20,43 juta, mengalami penurunan sebesar 26,15 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebagaimana terlihat dalam gambar berikut :

Grafik 1.8
Perkembangan Impor Tahun 2021 – 2023



Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari total impor pada Desember 2022 berdasarkan negara asal, impor terbesar berasal dari Singapore senilai US\$11,48 juta. Impor dari Singapore didominasi oleh golongan bahan bakar mineral (HS 27), yaitu Motor spirit, unleaded, of RON 90 and above but below RON 97, unblended. Secara kumulatif, impor dari Singapore mendominasi impor Sumatera Barat pada Januari-Desember 2022, yaitu 61,04 persen dari total impor.

Tabel 1.23
Nilai Impor Sumatera Barat menurut Negara Asal
Desember 2022–Desember 2023

Negara	Nilai CIF (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan-Okt 2023 (%)
	Okt 2022	Sept 2023	Okt 2023	Jan-Okt 2022	Jan-Okt 2023	Okt 2023 thd Sept 2023	Okt 2023 thd Okt 2022	Jan-Okt 2023 thd Jan-Okt 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 Malaysia	1,67	0,09	22,87	100,32	81,96	24.630,35	1.268,27	-18,30	24,71
2 Singapura	36,77	10,18	10,61	299,30	160,09	4,27	-71,14	-46,51	48,26
3 Thailand	-	-	4,75	3,19	21,13	-	-	562,88	6,37
4 Oman	-	-	2,23	3,78	7,34	-	-	94,27	2,21
5 Arab Saudi	0,20	-	1,91	0,20	1,91	-	842,38	842,38	0,58
Total 7 Negara Asal	38,65	10,27	42,36	406,79	272,43	312,37	9,61	-33,03	82,13
Lainnya	13,03	8,27	0,75	82,48	59,29	-90,97	-94,27	-28,12	17,87
Total Impor	51,67	18,54	43,11	489,27	331,71	132,45	-16,58	-32,20	100,00

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari total impor pada Desember 2022 senilai US\$20,43 juta, sebagian besar merupakan golongan bahan baku/penolong yang mengalami penurunan sebesar 12,89 persen dibanding dengan bulan sebelumnya.

Tabel 1.24
Nilai Impor Sumatera Barat menurut Golongan Barang
Desember 2022–Desember 2023

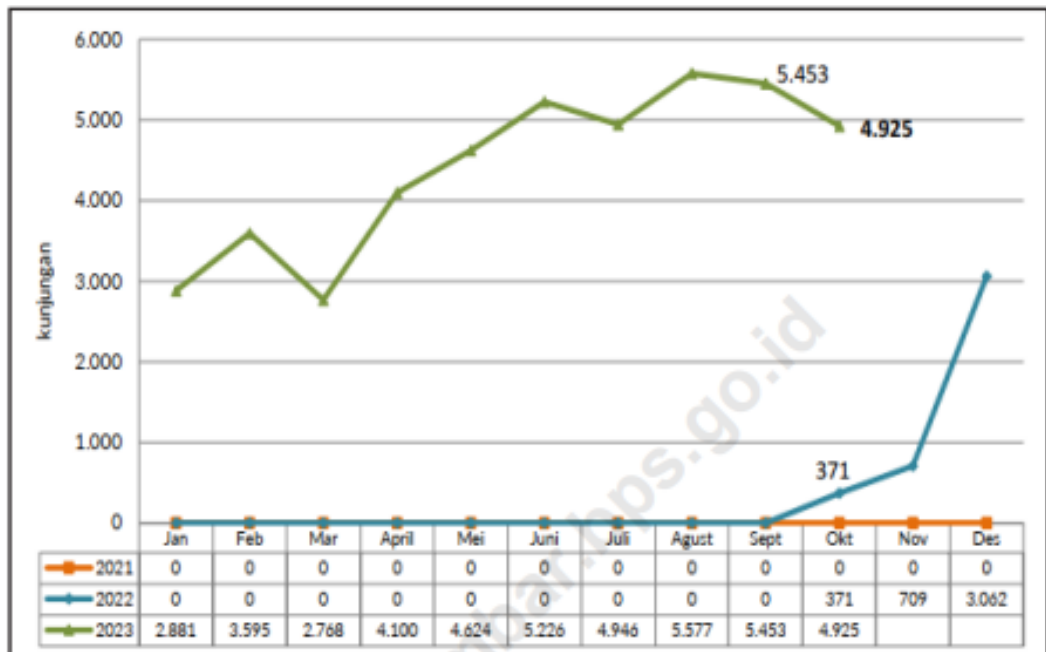
Golongan Barang	Nilai CIF (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan-Okt 2023 (%)
	Okt 2022	Sept 2023	Okt 2023	Jan-Okt 2022	Jan-Okt 2023	Okt 2023 thd Sept 2023	Okt 2023 thd Okt 2022	Jan-Okt 2023 thd Jan-Okt 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 BAHAN BAKU/PENOLONG	48,98	18,48	37,93	472,66	307,45	105,25	-22,56	-34,95	92,68
2 BARANG KONSUMSI	0,00	-	4,75	0,00	19,72	-	2.791.954,71	1.618.719,62	5,94
3 BARANG MODAL	2,69	0,07	0,43	16,60	4,55	560,13	-83,92	-72,60	1,37
Total Impor	51,67	18,54	43,11	489,27	331,71	132,45	-16,58	-32,20	100,00

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari sektor pariwisata dimana Sumatera Barat salah satu tujuan wisata yang menarik di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat dengan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha sekaligus memperkenalkan identitas dan kebudayaan bangsa. Hal ini dapat terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan, Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) dan rata-rata lama menginap untuk tamu asing dan tamu dalam negeri di Sumatera Barat.

Gambar dibawah ini menunjukkan perkembangan wisatawan mancanegara (wisman) dari bulan Januari 2020 sampai dengan oktober 2022. Terlihat bahwa sejak bulan April 2020 sampai dengan September 2022 tidak ada kunjungan wisman karena bandara masih menutup penerbangan ke luar negeri karena covid-19, tetapi mulai Oktober 2022 sudah ada wisman yang datang ke Sumatera Barat melalui BIM semenjak dibukanya penerbangan ke Malaysia sebanyak 373 orang sejak catatan kunjungan terakhir yaitu 2.495 orang pada keadaan Maret 2020.

Grafik 1.9
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman ke Sumatera Barat
Januari 2021 - Oktober 2023



Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia (dalam persen), yang menunjukkan apakah suatu akomodasi diminati oleh pengunjung atau tidak. TPK hotel berbintang pada Oktober 2022 berdasarkan laporan yang masuk tercatat sebesar 49,20 persen. Ini berarti TPK Oktober 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,76 poin dibandingkan dengan TPK September 2022 yang tercatat sebesar 47,44 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan TPK Oktober 2021 yang tercatat sebesar 52,25 persen, TPK Oktober 2022 mengalami penurunan sebesar 3,05 poin.

Grafik 1.10
Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di Sumatera Barat Januari 2021 - Oktober 2023



Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

TPK hotel berbintang menurut klasifikasi hotel selama periode Oktober 2021, September 2022, dan Oktober 2022 disajikan pada berikut ini :

Tabel 1.25
TPK Hotel Bintang menurut Klasifikasi Bintang di Sumatera Barat

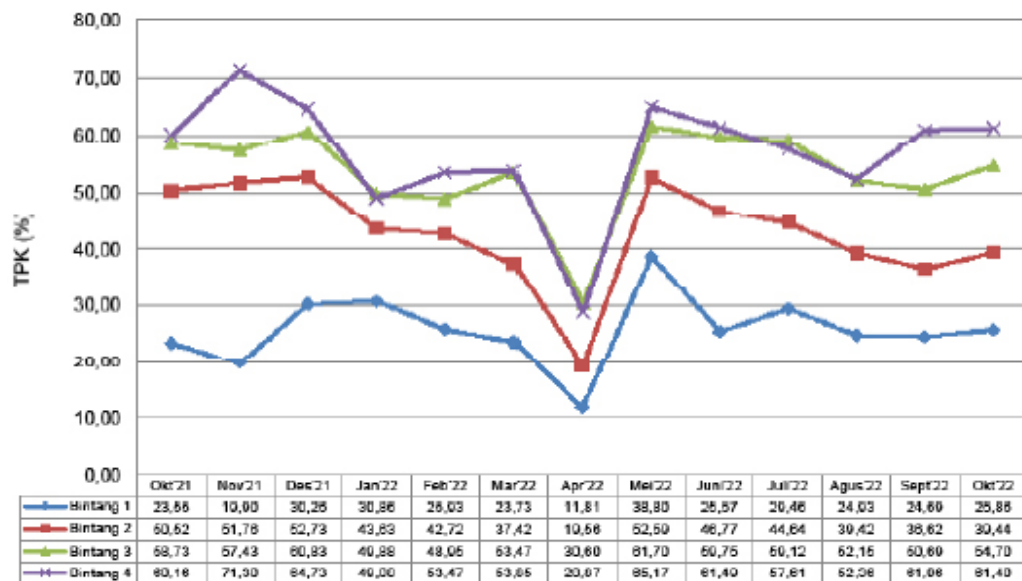
Klasifikasi Bintang	TPK (%)			Perubahan Oktober 2023	
	Oktober 2022	September 2023	Oktober 2023	thd September 2023 (poin)	thd Oktober 2022 (poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Bintang 1	25,86	23,34	23,22	-0,12	-2,64
2. Bintang 2	39,44	41,20	37,20	-4,00	-2,24
3. Bintang 3	54,70	55,92	58,83	2,91	4,13
4. Bintang 4	61,40	55,84	57,82	1,98	-3,58
Seluruh Bintang	49,20	47,45	49,09	1,64	-0,11

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Bila dilihat menurut klasifikasi hotel, peningkatan TPK terjadi pada kategori hotel bintang. Peningkatan TPK tertinggi terjadi pada hotel bintang 3, yaitu naik sebesar 4,01 poin. Selanjutnya, hotel bintang 2, hotel bintang 1, dan hotel bintang 4 masing-masing mengalami peningkatan TPK sebesar 2,82 poin, 1,17 poin, dan 0,34 poin. TPK tertinggi periode Oktober 2022 tercatat pada hotel bintang 4 yang mencapai 61,40 persen, diikuti bintang 3 sebesar 54,70 persen, dan bintang 2

sebesar 39,44 persen. TPK terendah tercatat pada hotel bintang 1 yaitu sebesar 25,86 persen.

Grafik 1.11
Perkembangan TPK Hotel Berbintang menurut Klasifikasi Bintang
di Sumatera Barat, Oktober 2021 - Oktober 2022



Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan pada TPK hotel nonbintang pada Oktober 2022 tercatat sebesar 17,56 persen, turun 1,01 poin dibandingkan TPK September 2022 yang tercatat sebesar 18,57 persen. Jika dilihat lebih rinci, penurunan TPK terjadi pada seluruh kelompok kamar. Penurunan TPK tertinggi terjadi pada hotel nonbintang dengan kelompok kamar >40, yaitu turun sebesar 3,01 poin. Selanjutnya, hotel nonbintang dengan kelompok kamar 24-40 dan kelompok kamar <10 masing-masing mengalami penurunan TPK sebesar 2,65 poin dan 1,15 poin. Hotel nonbintang dengan kelompok kamar 10-24 mengalami penurunan TPK sebesar 0,02 poin. TPK tertinggi untuk hotel nonbintang tercatat pada hotel dengan kelompok kamar >40 yaitu sebesar 25,28 persen. Sebaliknya, TPK terendah tercatat pada hotel nonbintang dengan kelompok kamar <10 yakni 11,03 persen. Rincian TPK hotel nonbintang menurut kelompok kamar disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.26**TPK Hotel Nonbintang menurut Kelompok Kamar di Sumatera Barat**

Kelompok Kamar	TPK (%)			Perubahan Okt 2023 thd September 2023 (poin)	Perubahan Okt 2023 thd Okt 2022 (poin)
	Oktober 2022	September 2023	Oktober 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kamar <10	11,03	12,22	10,03	-2,19	-1,00
2. Kamar 10-24	19,07	17,71	17,12	-0,59	-1,95
3. Kamar 25-40	18,33	16,45	16,28	-0,17	-2,05
4. Kamar >40	25,28	17,67	19,73	2,06	-5,55
Seluruh Non Bintang	17,56	16,27	15,63	-0,64	-1,93

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Rata-Rata Lama Menginap Tamu (RLMT) Asing dan Indonesia digunakan untuk mengetahui berapa lama seorang tamu menginap di suatu akomodasi pada suatu waktu tertentu.

RLMT Asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Sumatera Barat pada Oktober 2022 adalah selama 1,32 hari, naik 0,04 hari bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 1,28 hari. RLMT asing pada Oktober 2022 tercatat 1,52 hari, turun sebesar 0,67 hari dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 2,19 hari. RLMT Indonesia pada September 2022 tercatat 1,32 hari, mengalami peningkatan sebesar 0,05 hari jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 1,27 hari.

Bila dirinci menurut kelas hotel, terlihat RLMT asing pada hotel bintang 3 yang tercatat 2,06 hari, paling tinggi dibandingkan kelas hotel lainnya. Selanjutnya, RLMT asing pada hotel bintang 4 tercatat 1,37 hari, diikuti oleh hotel bintang 2 dan hotel bintang 1 yang masing-masing tercatat 1,23 hari dan 1,00 hari. Sementara itu, RLMT Indonesia pada hotel bintang 4 tercatat 1,40 hari, paling tinggi dibanding kelas hotel lainnya. Berikutnya, RLMT Indonesia pada hotel bintang 3 tercatat 1,29 hari, diikuti oleh hotel bintang 1 yang tercatat 1,24 hari, dan hotel bintang 2 tercatat 1,21 hari.

Tabel 1.27
Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia
pada Hotel Bintang di Sumatera Barat

No.	Klasifikasi Bintang	Rata-Rata Lama Menginap Tamu (hari)								
		Asing			Indonesia			Total		
		Okt 2022	Sept 2023	Okt 2023	Okt 2022	Sept 2023	Okt 2023	Okt 2022	Sept 2023	Okt 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Bintang 1	1,00	2,43	1,50	1,24	1,13	1,20	1,24	1,14	1,20
2.	Bintang 2	1,23	1,94	1,40	1,21	1,13	1,09	1,21	1,19	1,12
3.	Bintang 3	2,06	1,48	1,72	1,29	1,04	1,24	1,29	1,05	1,24
4.	Bintang 4	1,37	1,31	1,56	1,40	1,41	1,52	1,40	1,41	1,52
Sumatera Barat		1,52	1,67	1,48	1,32	1,22	1,34	1,32	1,24	1,34

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

1.3. Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi tahun 2022 yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.28
Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

N o	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	OPD Penanggung Jawab
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing					
1	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	73,23	75,64	103,29	BPS
2	2 Angka Harapan Hidup (AHH)	69,98	74,14	105,94	Diskes
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,43	9,8	0,40	Dinkes
4	Rata-rata lama sekolah	9,28	9,28	100	BPS
5	Harapan Lama Sekolah	14,06	14,11	100,35	Disdik

N o	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	OPD Penanggung Jawab
6	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	49,75	52,14	109	Disnakertrans
Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah					
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,90	56,90	93,4	Disbud
2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	62,80	61,97	97,3	Disbud
3	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	14	16,41	117	Disdik
4	Indeks Pembangunan Keluarga	61,39	60,99	99,3	DP3A
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,25	94,72	100,4	DP3A
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,95	63,65	96,5	DP3A
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan					
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani (%)	5	8,3	166	DPTPH
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,19	115,36	114	DPTPH
3	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	103,98	108,97	104,7	DPTPH
4	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Jt)	48,590	50.989	104,9	DKP
5	Pendapatan nelayan (Rp. Jt)	41,611	41,758	100,3	DKP
6	Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	50,265	52,458	104,36	DPKH
7	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	5	0	0	DPTPH
8	Indeks Ketahanan Pangan	80,21	83,22	103,7	Dinas

N o	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	OPD Penanggung Jawab
					Pangan
9	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan (%)	5	17,24	344,8	Dinas Kehutanan
Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital					
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	16,70	16,91	101,26	Disperindag
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	8,88	8,75	98,5	Disperindag
3	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	1	4,81	481	Disperindag
4	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	379	406	107,12	Diperindag
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,18	5,58	255,9	Disperindag
6	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	3,1	3,2	103,2	Disperindag
7	Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	130482	240385	184,2	DKUKM
8	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	8,00	125,84	1573	Disperindag
9	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	6,70	6,72	100,2	Disperindag
Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan					
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,34	4,41	101,61	Dispar
2	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB	1,35	1,37	101,48	Dispar

N o	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	OPD Penanggung Jawab
3	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	6,02	7,34	121,92	Dispar
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan					
1	Indeks Kinerja Infrastruktur	0,731	0,653	89,3	DPUPR
2	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,676	0,67	99,1	DPUPR
3	Kemantapan Jalan (%)	77,00	67,99	88,2	DPUPR
4	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,63	0,80	126,9	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	77,95	75,85	97,3	DLH
6	Akses Air Minum (%)	84,00	84,93	101,1	DLH
7	Akses Sanitasi Layak (%)	84,00	84,96	101,1	DLH
8	Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%)	55,55	67,99	122,3	DPUPR
9	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	71,92	71,92	100	DPUPR
10	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air (%)	55,28	59,40	107,4	DPUPR
11	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	68,27	67,57	98,9	DPUPR
12	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%)	87,00	87,75	100,8	DPUPR
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas					
1	Indeks reformasi birokrasi	69,50	76,25	109,71	Biro

N o	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	OPD Penanggung Jawab
					Organisasi
2	Nilai SAKIP (predikat)	(78,00)	78,34	100,43	Biro Organisasi
3	Nilai EPPD (skor)	3,0020	2,7333	89,9	Biro Pemerintah n
4	Opini laporan keuangan (opini)	WTP	WTP	100	DPKAD
5	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	38,25	44,31	115,8	DPKAD
6	Indeks SPBE (indeks)	3,30	3,75	113	Diskominfoti k
7	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	76,00	61,46	80,8	BKN
8	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	87,5	89,11	101,84	Biro Organisasi

2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.29

Realisasi Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
I.	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.	Urusan Pendidikan				
	a. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (%)	73,49	89,3	121,51	Disdik
	b. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus(%)	54,72	34,37	62,81	Disdik
	c. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	58,51	43,52	74,38	Disdik
	d. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	27,70	60,48	218,34	Disdik
	e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat(%)	94,70	106,08	112,02	Disdik
	f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (%)	53,88	51,88	96,29	Disdik
	g. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (%)	34,27	30,49	88,97	Disdik
	h. Persentase SMA Negeri terakreditasi (%)	89,47	100	111,77	Disdik
	i. Persentase SMK Negeri terakreditasi (%)	86,70	99,13	114,34	Disdik
	j. Persentase SLB Negeri terakreditasi (%)	55,03	86,21	156,66	Disdik
2.	Urusan Kesehatan				
	a. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (RSAM, RS M.Natsir, RSUD	1:87	1:72	91,9	Dinas Kesehatan

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	Pariaman)				
	b. Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi (%)	100	100	100	Dinas Kesehatan SAM, RS, M. Natsir, RSJ HB Sa'anin Padang, RSUD Solok
	c. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	100	100	100	Dinas Kesehatan
	d. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	100	100	100	Dinas Kesehatan
	e. Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	98,2	99,64	101,46	Dinas Kesehatan
	f. Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	80	80	100	Dinas Kesehatan
	g. Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	89	89	100	Dinas Kesehatan
	h. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	80	89	111,25	Dinas Kesehatan
	i. Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	88,2	92,01	104,31	Dinas Kesehatan
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	0,69	0,35	50,72	Dinas SDA dan Bina Konstruksi
	b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi,	0,83	2,66	320,48	Dinas SDA dan Bina

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi (%)				Konstruksi
	c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	0,19	4,0	2110,52	Dinas SDA dan Bina Konstruksi
	d. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	11,11	0,75	6,75	Dinas SDA dan Bina Konstruksi
	e. Persentase volume tampungan sumber-sumber air	55,28	59,40	107,45	Dinas SDA dan Bina Konstruksi
	f. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	100	0	0	Dinas BMCKTR
	g. Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	100	0	0	Dinas BMCKTR
	h. Rasio kemantapan jalan provinsi	77	67,5	87,66	Dinas BMCKTR
	i. Akses Air Minum Layak (%)	84	85,23	101,46	Dinas BMCKTR
	j. Akses Sanitasi Layak (%)	84	69,27	82,46	Dinas BMCKTR
	k. Persentase penataan bangunan pada Kawasan strategis (%)	40	0	0	Dinas BMCKTR
	l. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	87	87	100	Dinas BMCKTR
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	a. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	Dinas Perkimtan
	b. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100	100	Dinas Perkimtan
	c. Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani (%)	14,18	7,09	50	Dinas Perkimtan
	d. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	6	5	83,33	Dinas Perkimtan
	e. Persentase Peningkatan PSU Permukiman (%)	34,51	135	391,19	Dinas Perkimtan
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
	a. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	79,00	79,00	100	Satpol PP
	b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	79,00	79,00	100	Satpol PP
	c. Indeks Penegakan Peraturan Daerah	78	78	100	Satpol PP
	d. Persentase Kabupaten/Kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	84,21	84,21	100	Satpol PP
	e. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	56	56	100	Satpol PP
	f. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	43,7	18,75	42,90618	BPBD
	g. Persentase penanganan pra bencana	100	100	100	BPBD

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	h. Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100	100	BPBD
6.	Urusan Sosial				
	a. Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	Dinas Sosial
	b. Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	Dinas Sosial
	c. Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	Dinas Sosial
	d. Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	100	100	100	Dinas Sosial
	e. Indeks Partisipasi Sosial (indeks)	0,687	75,3	10960,7	Dinas Sosial
II.	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
7.	Urusan Ketenagakerjaan				
	a. Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja. (%)	100	42,11	42,11	Dinas Nakertrans
	b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	35,72	41,50	116,18	Dinas Nakertrans
	c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	8,55	1,17	13,68	Dinas Nakertrans
	d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	46,29	64,84	140,07	Dinas Nakertrans
	e. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	36,10	61,42	170,13	Dinas Nakertrans

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.				
	f. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	16,58	25,13	151,56	Dinas Nakertrans
	g. Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan (%)	62,87	84,27	134,03	Dinas Nakertrans
	h. Persentase Serapan tenaga Kerja	36,01	68,23	189,47	Dinas Nakertrans
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	a. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	4,30	4,3	100	Dinas P3AP2KB
	b. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100.000 penduduk perempuan)	15	8,13	54,2	Dinas P3AP2KB
	c. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (rasio)	2,08	3,5	168,26	Dinas P3AP2KB
	d. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	18	19	105,55	Dinas P3AP2KB
	e. Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	Utama	Utama		Dinas P3AP2KB
	f. Persentase perempuan di legislative (%)	10,76	10,77	100,09	Dinas P3AP2KB
	g. Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	13,2	25	189,39	Dinas P3AP2KB
	h. Persentase Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	37,70	37,7	100	Dinas P3AP2KB
	i. Indeks pemenuhan hak anak	67,53	65,73	100	Dinas P3AP2KB
	j. Jumlah kasus perceraian baru	61,125	2077	33,9102	Dinas

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
					P3AP2KB
9.	Urusan Pangan				
	a. Persentase cadangan pangan (%)	94	168,06	178,78	Dinas Pangan
	b. Ketersediaan pangan utama (ton)	845,607	852366	100799,3	Dinas Pangan
	c. Skor Pola Pangan Harapan (skor)	83	90,5	109,03	Dinas Pangan
	d. Persentase Keamanan pangan yang beredar di masyarakat (%)	83,5	84	100,59	Dinas Pangan
	e. Coefisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV)				
	- Beras	CV≤10	2,71		Dinas Pangan
	- Cabe Merah	CV≤25	21,09		Dinas Pangan
	- Bawang Merah	CV≤25	19,54		Dinas Pangan
10.	Urusan Pertanahan				
	a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	2			Dinas Perkimtan
	b. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)	100	100	100	Dinas Perkimtan
	c. Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	2	2	100	Dinas Perkimtan
	d. Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)	100	100	100	Dinas Perkimtan
11.	Urusan Lingkungan Hidup				
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	77,95	75,04	96,26	Dinas LH
	b. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)	77	78	101,29	Dinas LH

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	c. Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	65	61,34	94,36	Dinas LH
	- Persentase pengurangan sampah (%)	19	16,23	85,42	Dinas LH
	- Persentase penanganan sampah (%)	58	50,31	86,74	Dinas LH
	- Jumlah LB3 yang dikelola (ton/tahun)	287,419	294567	102,48	Dinas LH
	d. Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kengkapian lingkungan (%)	82	105,61	128,79	Dinas LH
	e. Persentase penurunan beban pencemaran (%)	2,5	2,74	109,6	Dinas LH
	f. Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (%)	0,05	0,15	300	Dinas LH
13.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	a. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	3	100	100	Dinas Dukcapil
	b. Pemanfaatan data kependudukan (%)	100	100	100	Dinas Dukcapil
	c. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan berdasarkan target nasional (%)	100	91,79	101,42	Dinas Dukcapil
14.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	a. Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	10,43	10,71	102,68	Dinas PMD
	b. Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	2,02	17,12	847,52	Dinas PMD
	c. Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	61	85	139,34	Dinas PMD
	d. Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	450	627	139,33	Dinas PMD

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	e. Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif				Dinas PMD
	- Kerapatan Adat Nagari (KAN)	400	400	100	Dinas PMD
	- Posyandu Mandiri	2.500	2500	100	Dinas PMD
	- LPM mandiri	15	15	100	Dinas PMD
	- Dasa Wisma Mandiri	11.800	11800	100	Dinas PMD
12.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	a. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	2,67	2,67	100	Dinas P3AP2KB
	b. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	63,00	63	100	Dinas P3AP2KB
	c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,22	11,22	100	Dinas P3AP2KB
	d. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	18,60	18,6	100	Dinas P3AP2KB
	e. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22,00	22	100	Dinas P3AP2KB
15.	Urusan Perhubungan				
	a. Rasio konektivitas Provinsi	0,676	0,671	99,26	Dinas Perhubungan
	b. Kinerja lalu lintas provinsi	0,50	0,48	96	Dinas Perhubungan
16.	Urusan Komunikasi dan Informatika				
	a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	99	99	Diskominfo
	b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) (75 UKPP)	60	69,33	115,55	Diskominfo
	c. Persentase masyarakat yang menjadi	20	19,2	96	Diskominfo

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)				
	d. Indeks domain kebijakan internal SPBE	3,2	4,3	134,37	Diskominfo
	e. Indeks domain Tata Kelola SPBE	3,2	4,4	137,5	Diskominfo
	f. Indeks domain Manajemen SPBE	3,2	2,91	90,93	Diskominfo
	g. Indeks domain Layanan SPBE	3,2	4,45	139,06	Diskominfo
17.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	a. Persentase Koperasi yang berkualitas	20,49	21,15	103,22	DinasKoperasi dan UKM
	b. Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	3	9,58	319,33	DinasKoperasi dan UKM
18.	Urusan Penanaman Modal				
	Persentase peningkatan investasi di provinsi (%)	8,00	53,79	672,37	DPMPTSP
19.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				
	a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,104	0,104	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
	b. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	5,16	5,76	111,62	Dinas Pemuda dan Olahraga
	c. Peningkatan prestasi olahraga (medali)	26	39	150	Dinas Pemuda dan Olahraga
20.	Urusan Statistik				
	a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	70	75	107,14	Diskominfo
	b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	70	75	107,14	Diskominfo

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)				
21.	Urusan Persandian				
	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	47	64,31	136,82	Diskominfo
22.	Urusan Kebudayaan				
	a. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	66,67	66,67	Dinas Kebudayaan
	b. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)	86	96	66,67	Dinas Kebudayaan
23.	Urusan Perpustakaan				
	a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (nilai)	64,30	64,30	100	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
	b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	14	14	100	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
24.	Urusan Kearsipan				
	a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	72	72	100	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
	b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	76,66	76,66	100	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
III.	URUSAN PILIHAN				
25.	Urusan Kelautan dan Perikanan				
	a. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh	487,949	479475,132	98263,37	DKP

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	Kabupaten/Kota di wilayah Prov. (sumber data: one data KKP)				
	b. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	84	87	103,57	DKP
26.	Urusan Pariwisata				
	a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	1,5	845,22	56348	Dinas Pariwisata
	b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	1,5	32,38	2158,66	Dinas Pariwisata
	c. Tingkat hunian akomodasi (%)	40,32	40,32	100	Dinas Pariwisata
27.	Urusan Pertanian				
	a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	8,77	9,92	113,11	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	b. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)	2,75	4,31	156,72	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	c. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura (%)	1,75	9,48	541,71	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	d. Persentase peningkatan produksi tanaman Perkebunan (%)	1	1,13	113	Dinas Perkebunan Tanaman

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
					Pangan dan Hortikultura
	e. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	4,71	4,71	100	Dinas Peternakan dan Keswan
	f. Persentase peningkatan produksi peternakan (%)	1,51	1,51	100	Dinas Peternakan
28.	Urusan Kehutanan				
	a. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	20	31,33	156,65	Dishut
	b. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	1,79	0,77	43,01	Dishut
	c. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	3,81	3,83	100,52	Dishut
	d. Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	60	60	100	Dishut
	e. Indeks tutupan hutan (Indeks)	60,55	63,77	105,31	Dishut
29.	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral				
	a. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda (%) (catatan : Jika telah ada pendelegasian wewenang dari Pemerintah ke Pemerintah Provinsi)	45	40	100	Dinas ESDM
	b. Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	100	100	100	Dinas ESDM
	c. Rasio Elektrifikasi	99,60	99,99	100,39	Dinas ESDM
	d. Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	33,3	31,49	94,56	Dinas ESDM
	e. Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	55	55	100	Dinas ESDM
30.	Urusan Perdagangan				
	a. Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp.Juta)	1449,41	2724,448	187,96	Dinas Perindag
	b. Persentase penanganan pengaduan	89	92,5	103,93	Dinas

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	konsumen (%)				Perindag
	c. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	25	70	280	Dinas Perindag
	d. Tertib Usaha	64	49	76,56	Dinas Perindag
	e. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	27,5	28	101,81	Dinas Perindag
	f. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	74	57,79	78,09	Dinas Perindag
	g. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	6	6	100	Dinas Perindag
	h. Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp. Triliun)	44,16	49,32	111,68	BPS
31.	Urusan Perindustrian				
	a. Persentase pertambahan jumlah industri besar di provinsi (%)	0,41	1,33	324,39	Dinas Perindag
	b. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	0,13	126	96923,08	Dinas Perindag
	c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	84	83,11	98,94	Dinas Perindag
	d. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	92	100	108,69	Dinas Perindag
	e. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin	90	100	111,11	Dinas Perindag

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)				
	f. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	90	90	100	Dinas Perindag
	g. Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp.Triliun)	16	21,98	137,37	Dinas Perindag
	h. Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	43,263	46900	108,40	Dinas Perindag
32.	Urusan Transmigrasi				
	a. Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi	40,00	75,89	189,72	Dinas Nakertrans
	b. Indeks perkembangan kawasan transmigrasi	72,08	72,08	100	Dinas Nakertrans
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
33.	Unsur Sekretariat Daerah				
	a. IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga Pimpinan (nilai)	88,70	91,52	103,17	Biro Umum
	b. IKM Pelayanan Pimpinan (nilai)	88,70	90,14	101,62	Biro Umum
	c. IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah (nilai)	88,70	89,75	101,18	Biro Umum
	d. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	80,15	80,89	100,92	Biro Administrasi Pimpinan
	e. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Adm Kepegawaian	80,15	80,92	100,96	Biro Administrasi Pimpinan
	f. Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (%)	80	127,5	159,37	Biro Administrasi Pimpinan

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	g. Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel (%)	85	100	117,64	Biro Pemerintahan dan Otda
	h. Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama (%)	100	100	100	Biro Pemerintahan dan Otda
	i. Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya (%)	85	100	117,64	Biro Pemerintahan dan Otda
	j. Persentase usulan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya (%)	100	100	100	Biro Pemerintahan dan Otda
	k. Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi (%)	100	99,70	99,7	Biro Pemerintahan dan Otda
	l. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (tender dini dan tahun jamak) (%)	2,04	2,8	137,25	Biro PBJ
	m. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	14,16	14	98,87	Biro PBJ
	n. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (belanja pengadaan dibagi dengan paket melalui penyedia pada RUP) (%)	30	15	50	Biro PBJ
	o. Indeks pengadaan barang dan jasa minimal baik (skor)	93	95	102,15	Biro PBJ
	p. Persentase tingkat keselarasan rumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditetapkan (%)	7	11	157,14	Biro Perekonomian
	q. Persentase koordinasi penerapan kebijakan pusat yg diimplementasikan	92	100	108,69	Biro Perekonomian

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	pemprov (%)				n
	r. Persentase kebijakan perekonomian pusat dan pemprov yang diimplementasikan kab/kota (%)	92	100	108,69	Biro Perekonomia n
	s. Persentase BUMD yg memiliki perencanaan baik (%)				Biro Perekonomia n
	t. Persentase BUMD yg memiliki pelaporan yg baik (%)				Biro Perekonomia n
	u. Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi (Lembaga)	3	9	300	Biro Kesra
	v. Jumlah Kebijakan daerah pada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang dirumuskan (dokumen)	6	4	66,66	Biro Kesra
	w. Persentase penyelesaian produk hukum daerah (%)	100	100	100	Biro Hukum
	x. Persentase penyelesaian bantuan hukum (%)	100	100	100	Biro Hukum
	y. Persentase OPD yg tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	100	100	100	Biro Organisasi
	z. Persentase Kab/kota yg OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	100	100	100	Biro Organisasi
	aa. Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	10	11	110	Biro Organisasi
	bb. Nilai Komponen pelaporan kinerja Pemda (Nilai)	12,7	12,76	100,47	Biro Organisasi
	cc. Hasil penilaian mandiri area manajemen perubahan (nilai)	1,85		0	Biro Organisasi
	dd. Jumlah Inovasi pelayanan Publik yang lolos seleksi saringan kompetisi secara nasional (inovasi)	9	9	100	Biro Organisasi
	ee. Jumlah Perangkat daerah yang	16	28	175	Biro

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	melaksanakan penguatan ketatalaksanaan (Perangkat Daerah)				Organisasi
	ff. Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan	92	95,62	103,93	Biro Administrasi Pembangunan
34.	Unsur Sekretariat DPRD				
	Indek Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	91,05	101,1667	Set DPRD
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
35	Unsur Perencanaan				
	Indeks kualitas perencanaan	77	79,97	103,85	Bappeda
36	Unsur Keuangan				
	a. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	8,43	22,8	270,46	BPKAD
	b. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	4,2	-31,4	-747,61	BPKAD
	c. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	3,56	-20,4	-573,03	BPKAD
	d. Assets management	100	100	100	BPKAD
	e. Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,61	4,36	120,77	BPKAD
	f. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	100	100	BPKAD
	g. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	87,05	71,90	82,59	BPKAD
	h. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP		BPKAD
	i. Informasi tentang sumber daya yang	100	100	100	BPKAD

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	tersedia untuk pelayanan (Persentase Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda) (%)				
	j. Rasio PAD terhadap PDRB (%)	1,85	2,57	138,91	Bapenda
	k. Persentase Peningkatan PAD (%)	7,2	-9,6	-133,33	Bapenda
37.	Unsur Kepegawaian				
	a. Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	202	261	127,94	BKD
	b. Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	40	21	42	BKD
	c. Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	64	43	65,15	BKD
	d. Nilai penerapan sistem merit	300	332	102,15	BKD
38.	Unsur Pendidikan dan Pelatihan				
	a. Persentase ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran per tahun	4,6	11,01	234,25	BPSDM
	b. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	85	92,7	107,79	BPSDM
	c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	88,2	107,56	BPSDM
39.	Unsur Penelitian dan Pengembangan				
	a. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan pengkajian (%)	50	66,67	133,34	Balitbang
	b. Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah produk)	10	13	130	Balitbang

No	INDIKATOR	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	c. Persentase SKPD yang terinovatif (%)	30	72,55	241,83	Balitbang
40	Unsur Penghubung				
	a. Persentase koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga	100	100	100	Badan Penghubung
	b. Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain (%)				
	c. Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik (bidang urusan)	5	6	120	Badan Penghubung
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
41.	Inspektorat Daerah				
	a. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	3	3	100	Inspektorat
	b. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	3	3	100	Inspektorat
VII	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
42	Kesatuan Bangsa dan Politik				
	a. Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	3	0	0	Badan Kesbangpol
	b. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	68,50	77,35	112,91	Badan Kesbangpol

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah yang menaungi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.067.129.634 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.920.620.969 atau 99,23% dengan uraian sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja 2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja dimaksud disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.1**Capaian Kinerja Sasaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	77	79,97	103,85
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25	81,73	103,12
III	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	83,00	96,93	116,78

2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100	17.030.946.642	16.819.340.904	98,76
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100	75.590.250	72.692.000	96,17

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	100	32.148.750	31.728.250	98,69
2	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	100	43.441.500	40.963.750	94,30
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100	11.134.886.770	11.072.355.763	99,4
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan	85 orang	84 orang	100	10.927.128.520	10.866.478.513	99,4

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		tunjangan						
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	22 orang	100	169.654.250	167.774.250	98,89
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran yang disiapkan	13 laporan	13 laporan	100	38.104.000	38.103.000	100,00
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100	112.669.042	111.049.280	98,56
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	11 unit	12 unit	100	104.303.792	104.270.880	99,97

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	6.325.250	4.738.500	74,91
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	2.641.657.734	2.562.763.946	97,01
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 Jenis	25 Jenis	100	23.802.400	23.792.200	99,96
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2 jenis	12 jenis	100	75.183.050	42.214.053	56,15

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		disediakan						
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 jenis	20 jenis	100	154.496.820	148.747.379	96,28
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60 Jenis	81 Jenis	100	143.959.100	134.846.900	93,67
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	10 jenis	100	25.000.000	25.000.000	100,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	1 Laporan	1 Laporan	100	1.959.216.364	1.928.163.414	98,42
14	Dukungan	- Jumlah Tenaga IT	4 Orang	4 Orang	100	260.000.000	260.000.000	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	3 Aplikasi					
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100	1.093.028.860	1.091.447.000	99,86
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 jenis	3 jenis	100	52.985.914	52.947.000	99,93
16	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya baru	1 jenis	-	100	1.040.042.946	1.038.500.000	99,85

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	1.470.823.986	1.435.686.047	97,61
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan - Jumlah tagihan	700 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA	2550 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000	100	302.790.000	284.792.317	94,06

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		lisensi zoom meeting yang dibayarkan - Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan	8 rekening	KVA 8 rekening				
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	25 orang	24 orang	100	1.168.033.986	1.150.893.730	98,53
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100	502.290.000	473.346.768	94,24

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	100	41.190.000	38.735.578	94,04
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	10 unit	100	292.210.000	288.977.880	98,89
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan	67 unit	54 unit	100	54.340.000	51.642.510	95,04

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		Mesin Lainnya						
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	1 unit	100	74.200.000	63.383.800	85,42
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	13 unit	42 unit	100	40.350.000	30.607.000	75,85
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan	80%	80%		998.186.225	994.211.050	99,60

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Daerah.	target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi						
VIII	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 dokumen	3 dok	100	775.011.175	772.873.700	99,72
24	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	100	45.630.500	45.608.250	99,95

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
25	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100			
26	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	100	245.818.200	245.608.950	99,91
27	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan	4 dokumen	4 dokumen	100	483.562.475	481.656.500	99,61

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Daerah Provinsi	ditetapkan.						
IX	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dok		79.103.750	79.084.050	99,98
28	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	100	25.368.950	25.356.750	99,95

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		Daerah						
29	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang mendukung Indikator Pembangunan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	100	53.734.800	53.727.300	99,99
X	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Persentase kesesuaian perencanaan	75%	75%		144.071.300	142.253.300	98,74

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Perencanaan Pembangunan Daerah	dengan pelaksanaan						
30	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	100	57.029.800	57.012.800	99,97
31	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	72 dokumen	72 dok	100	87.041.500	85.240.500	97,93

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
C	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi	85%	85%		1.133.386.833	1.101.555.650	97,19
XI	Koordinasi	Jumlah	3 dokumen	3 dok		474.718.500	463.788.150	97,70

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3 dokumen	3 dokumen	100	45.471.800	42.426.050	93,30

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
33	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	5 rumusan	5 rumusan	100	35.954.500	34.821.750	96,85
34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	40.663.350	40.064.550	98,53

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	100	12.317.500	11.498.000	93,35
36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan	3 dokumen	3 dokumen	100	38.150.600	37.733.100	98,91

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
37	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	5 rumusan	5 rumusan	100	25.449.600	24.987.850	98,19
38	Pelaksanaan Monitoring dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	100	64.627.650	61.184.400	94,67

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
39	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	100	212.083.500	211.072.450	99,52

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Pembangunan Manusia							
XII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 dokumen	3 dok		392.250.188	379.098.150	96,65
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	100	16.624.700	15.990.700	96,19

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	5 rumusan	5 rumusan	100	18.895.000	17.774.000	94,07
42	Pelaksanaan Monitoring dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	100	67.016.800	58.458.700	87,23

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	100	134.402.988	133.170.950	99,08

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 dokumen	3 dokumen	100	15.211.600	15.191.600	99,87
45	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	5 rumusan	5 rumusan	100	22.075.900	22.056.900	99,91
46	Pelaksanaan	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	92.567.900	91.123.600	98,44

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	100	25.455.300	25.331.700	99,51
XII	Koordinasi	Jumlah	3 dokumen	3		266.418.145	258.669.350	97,09

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		dokumen				
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 dokumen	3 dokumen	100	51.885.900	50.469.350	97,27

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	dan RKPD)							
49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	5 rumusan	5 rumusan	100	22.561.845	22.422.950	99,38
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	64.391.000	61.837.550	96,03

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	100	13.034.500	12.945.500	99,32
52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan	3 dokumen	3 dokumen	100	6.765.700	6.158.700	91,03

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah Bidang Kewilayahan						
53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan.	1 Laporan	100	22.309.100	20.670.200	92,65

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
54	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	100	85.470.100	84.165.100	98,47

Serapan anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 18.915.107.604,-, atau sebesar 98,71% dari total pagu Rp. 19.162.519.700,-. Anggaran tersebut tersebar dalam tiga program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; (2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan (3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kinerja masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan merupakan program dengan porsi anggaran paling besar yaitu Rp. 17.030.946.642,- (88,88 % dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2023), memiliki realisasi keuangan sebesar 98,76% atau sebesar Rp. 16.819.340.904,-.
- b) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 998.186.225,- (5,21% dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2023), memiliki realisasi keuangan sebesar 99,60 % atau sebesar Rp. 994.211.050,-.
- c) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh Bidang PPM, Bidang Ekonomi & SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.133.386.833,- (5,91% dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2023), memiliki realisasi keuangan sebesar 97,19 % atau sebesar Rp. 1.101.555.650,-.

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing
Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tidak ada permasalahan		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			

6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
II	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Mereview kembali target kinerja masing-masing program tidak hanya pada tataran output akan tetapi juga pada tataran outcome sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tidak ada permasalahan		
2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- sulitnya integrasi dengan data-data pada aplikasi SIPD, diharapkan melalui forum SDI dapat memberikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. - Permasalahan daerah kabupaten/kota yang belum menetapkan Perkada penyelenggaraan SDI agar segera menetapkan Perkada tentang penyelenggaraan SDI	- Pembina Data daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Provinsi Sumatera Barat di bawah Koordinator Bappeda Provinsi Sumatera Barat. - Pelaksanaan Forum Data secara berkala untuk mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.	
3	Kegiatan Pengendalian,	Tidak ada permasalahan		

	Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
III	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Pembangunan yang membutuhkan biaya yang besar, terutama dalam pencapaian target RPJMD dan target Program Unggulan Kepala Daerah sehingga target untuk pemenuhan kebutuhan belum tercapai. - Usulan pembangunan infrastruktur yang disampaikan belum memenuhi semua Readiness	- Menyusun skala prioritas pembangunan dengan memperhatikan target RPJMD, target Progul serta Readiness Criteria - Mengupayakan sumber-sumber pendanaan diluar APBD - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi publik yang melibatkan seluruh stakeholder	Konsisten dalam distribusi alokasi anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan program unggulan dan program prioritas daerah, capaian target kinerja tahun sebelumnya, pemerataan antar wilayah dan memperhatikan skala prioritas.

		Criteria yang ditetapkan. - Arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang berbasis Kawasan dari Pemerintah Pusat, belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan infrastruktur yang ada di daerah. - Usulan pembangunan dari stakeholder terkait, belum sepenuhnya memperhatikan kewenangan daerah		
1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Tidak ada permasalahan		

	Pembangunan Manusia			
2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tidak ada permasalahan		
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tidak ada permasalahan		

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Untuk mendukung capaian target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dialokasikan dana melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 19.162.519.700,- dengan realisasi Rp 18.915.107.604,- atau 98,71% yang tersebar pada 3 (tiga) Program yaitu Program Penunjang Urusan (7 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan) dengan anggaran Rp. 17.030.946.642,-; Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan) dengan anggaran Rp. 998.186.225,-; dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (3 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan) dengan anggaran Rp. 1.133.386.833,-.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah (dalam hal ini adalah dokumen laporan LPPD, LKPJ, LKJIP 2023 dan Laporan Tahunan)
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari 7 kegiatan ini seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yaitu persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi

- b. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dicapai dengan pelaksanaan :
 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan hasil terlaksananya Konsultasi Publik, Musrenbang Provinsi, dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.
 2. Kegiatan analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan
 3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan daerah.
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dicapai dengan pelaksanaan:
 - 1) Kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
 - 2) Kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam.
 - 3) Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Dari tiga kegiatan tersebut menghasilkan keluaran jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD). Tiga kegiatan ini seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan

RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi melalui mekanisme koordinasi, asistensi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada lingkup masing-masing Bidang di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2023 dalam menyelesaikan masalah strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Kebijakan Strategis Bappeda Provinsi Sumbar Tahun 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Evaluasi Capaian Renja pada Perangkat Daerah Provinsi, Indikator Kinerja Daerah, Program Unggulan, Pokok-Pokok Pikiran dan Indikator Program Tahun 2022	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	- meningkatkan komitmen TAPD dan seluruh Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pencapaian program unggulan pembangunan daerah - melahirkan solusi dan tindaklanjut yang komprehensif, cepat dan efektif yang bertujuan untuk menjamin tercapainya output program unggulan/prioritas pembangunan daerah dan target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta memastikan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
			hasilnya bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMD
2	Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem	1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 2. Permendagri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota	- Penduduk miskin di Sumatera Barat Maret 2022 sebesar 5.92% atau sebanyak 335.210 jiwa, sementara di antara mereka yang merupakan penduduk miskin ekstrem sebesar 0.77 % atau sebanyak 43.671 jiwa (P3KE, 2022). - Presiden Republik Indonesia memberikan instruksi dan menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 sebesar 0%. Target ini lebih cepat dari amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk pada tahun 2030

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
			- Diperlukan upaya ekstra ordinary dan intervensi program untuk mencapai kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024.
3	Mencetak 100 ribu milenial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif	Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat	- Indeks kewirausahaan Provinsi Sumatera Barat masih rendah. - Agar dapat meningkatkan daya saing diperlukan upaya mencetak milenial entrepreneur di Prov. Sumbar

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

Tabel 2.5

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Mereview kembali target kinerja masing-masing program tidak hanya pada tataran output akan tetapi juga pada tataran outcome sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.	Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 terdapat beberapa indicator kinerja beserta target antara lain yakni : 1. Indikator Kinerja Makro, yang merupakan ukuran kinerja pembangunan daerah yang berorientasi terhadap dampak antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Indeks Gini dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Target kinerja pada indicator kinerja makro ditentukan dengan memperhatikan capaian 5 tahun terakhir, adanya dampak pandemic covid serta target yang juga telah ditetapkan oleh Nasional 2. Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran kinerja yang	Target kinerja program agar berada pada tataran outcome sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		berorientasi pada manfaat yang diukur berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 3. Indikator Kinerja Daerah (IKD), yang merupakan ukuran kinerja yang berorientasi pada outcome yang diukur berdasarkan urusan atau fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. IKD yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 telah sepenuhnya mempedomani serta mengakomodir seluruh indicator kinerja yang tercantum dalam LPPD sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 18 Tahun 2020 serta juga telah mengakomodir Indikator Kinerja sesuai hasil pembahasan cascading yang disusun oleh Biro Organisasi 4. Indikator Kinerja Program, yang merupakan ukuran	

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		kinerja pada masing-masing Program sebagaimana telah diatur oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Indikator kinerja program merupakan berorientasi outcome yang merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang berada di bawahnya. Penetapan indikator kinerja program juga telah dilakukan melalui mekanisme pembahasan dengan Perangkat Daerah yang juga dalam rangkaian penyusunan RPJMD 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut, maka merubah indikator kinerja Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator	

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		Kinerja Program berserta targetnya tentu hanya dapat dilakukan dengan melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, dan berdasarkan pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: 1. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 2. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 3. terjadi perubahan yang mendasar antara lain mencakup mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis	

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional	
2.	Konsisten dalam distribusi alokasi anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan program unggulan dan program prioritas daerah, capaian target kinerja tahun sebelumnya, pemerataan antar wilayah dan memperhatikan skala prioritas.	Penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun 2022 telah memperhatikan rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mengingat penetapan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 pada tanggal 9 September 2021, dengan memperhatikan alokasi anggaran untuk Program Unggulan, capaian target kinerja serta pemerataan antar wilayah dan skala prioritas. Konsep pemerataan antar wilayah sesuai dengan dokumen RPJMD 2021-2026 yakni pembangunan/pengembangan wilayah sesuai dengan potensi yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam Bab VI RPJMD 2021-2026. Begitupun dalam penyusunan dokumen RKPD juga nantinya tetap	Konsisten anggaran agar sesuai dengan yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan skala prioritas

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		berpedoman pada RPJMD sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.	
3.	Perlu dilakukan penyelarasan antara program dan kegiatan yang bersumber dari tugas pembantuan dengan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan pada setiap tahunnya, diamanatkan untuk melakukan penyelarasan antara program prioritas nasional dan program prioritas daerah.	Dapat diinformasikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran tugas pembantuan yang berasal dari Kementerian/Lembaga (APBN) selama ini tidak pernah melibatkan Pemerintah Provinsi, dan juga tugas pembantuan bersifat top down. Selama ini, Pemerintah Provinsi mendapatkan informasi terkait dengan tugas pembantuan yang berada di Provinsi Sumatera Barat setelah adanya penetapan Peraturan Presiden tentang alokasi Dana Transfer ke Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan.	Adanya penyelarasan antara program prioritas nasional dan program prioritas daerah.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		Dapat diinformasikan bahwa menu Tugas Pembantuan dari tahun ke tahun selalu berubah-ubah dan tidak sama	

2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6

Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
.	Fraksi PDIP Dan PKB		
1.	Atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 ini Fraksi karni memberikan catatan terhadap adanya kenyataan yang terbalik setelah kita melihat asumsi-asumsi makro ekonomi dari yang ditargetkan dibanding dengan faktualnya/rillnya bahwa, untuk itu sudah saatnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk lebih mencari terobos-terobosan terhadap mandeknya pembangunan serta mengakibatkan pertumbuhan	Memperkuat hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan,peternakan, perikanan dan kehutanan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan	- Meningkatkan NTP (Nilai Tukar Petani) dan NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian) - Meningkatkan pendapatan nelayan - Meningkatkan pendapatan petani hutan

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	ekonomi yang rendah.	kehutanan.	
2.	kritikan yang sangat tajam terhadap ketidak merataan pembangunan karena di dalam rekomendasi DPRD Prov. Sumatera Barat masih juga bersifat umum, kenapa ini Fraksi kami sampaikan, bahwa salah satu kabupaten di Sumatera Barat ini yaitu Kab. Kep. Mentawai sangat perlu perhatian dan tindakan konkrit dari Pernerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat karena masih berlabelnya Kab. Kep. Mentawai sebagai daerah tertinggal, termiskin dan terbelakang.	Terhadap Kab.Kepulauan Mentawai telah diupayakan intervensi program/kegiatan penurunan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem dengan OPD terkait melalui strategi : a. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat b. Meningkatkan pendapatan masyarakat c. Meminimalkan kantong wilayah kemiskinan	Melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program/kegiatan kemiskinan yang dituangkan dalam dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Prov. Sumatera Barat)
3.	Terhadap catatan-catatan di masing-masing sector, Fraksi kami mengusulkan adanya catan-catan khusus terhadap ketimpangan dari pemerataan pembangunan yang kami sampaikan di atas		

3. Tindak Lanjut rekomensai Fraksi

Tabel 2.7

Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Fraksi Partai Gerindra		
1.	Fraksi Partai Gerindra Fraksi Gerindra mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk lebih ketat lagi dalam mengawasi program yang dikerjakan masing-masing OPD. Rencana kerja harus mengacu pada anggaran yang sudah ada dan tepat sasaran. Penyerapan anggaran juga harus bisa maksimal, sehingga SILPA tidak lagi besar.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja agar tetap tepat sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Beberapa upaya yang selama ini dilakukan yakni pengendalian pelaksanaan program kegiatan secara bulanan, triwulanan serta semesteran dan tahunan, yang dikordinir oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan memanfaatkan aplikasi Simbangda untuk melihat progress pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan yang secara lebih teknis dikordinir oleh masing-masing Asisten	Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap program yang dikerjakan masing-masing OPD. agar tepat sasaran.

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		Sekretaris Daerah. Selanjutnya yakni monitoring dan evaluasi RKPD semester I dan II yang dilakukan oleh Bappeda untuk melihat pencapaian target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan selain itu, di internal SKPD juga dilaksanakan Sistem Internal Pengendalian Pemerintah (SIPP) yang juga menjadi wadah diinternal SKPD untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas, program dan kegiatan.	
	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera		
1.	Terakhir kami meminta semua rekomendasi LKPJ Kepala Daerah tahun 2021 yang telah dikeluarkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk masa yang akan datang.	Semua rekomendasi LKPJ tahun 2021 yang dikeluarkan oleh DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang Dapat diinformasikan bahwa Rekomendasi DPRD	

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		terhadap LKPJ, LPPD, LAKIP, Hasil Temuan BPK dan Inspektorat serta menjadi salah satu acuan dalam proses verifikasi Rancangan dan rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah	
	Fraksi PDIP Dan PKB		
1.	Melihat belum adanya inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan terhadap program-program di OPD-OPD dimana setiap tahunnya kita masih merasakan hasilnya sama saja pada tahun yang lalu seperti pada posko pendapatan/belanja/realisasi/penyerapan, persoalan pertumbuhan ekonomi dibawah target, tingkat pengangguran yang dibawah target, seakan akan OPD-OPD tersebut masih melakukan copy paste tanpa melakukan inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan. APBD	Pelaksanaan progam dan kegiatan pada tahun 2022 hingga 2026 telah mengacu sepenuhnya pada dokumen RPJMD 2021-2026. Pada tahun 2021, tema pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2021 dan mengacu kepada tema nasional yakni Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, yang difokuskan pada : c. Pemulihan industri, pariwisata, dan investasi d. Reformasi sistem kesehatan nasional e. Reformasi sistem perlindungan social f. Reformasi sistem	Pernerintah Daerah Sumatera Barat diminta melakukan perbaikan ekonomi stimulus stimulus untuk percepatan perekonomian secara makro dengan berbagai inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	seakan-akan menjadi sebuah kue yang dibagi-bagi saja. kedepan menurut pendapat Fraksi kami hal ini tidak boleh terjadi lagi karena itu Fraksi kami berharap agar Pemerintah Daerah Sumatera Barat sangat serius dalam perbaikan ekonomi ini dengan membuat stimulus stimulus untuk percepatan perekonomian secara makro di Sumatera Barat dan terkhusus dalam sektor tenaga kerja Fraksi kami meminta Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk bisa serius dalam upaya penyerapan lulusan baru di dunia kerja dengan menjalin kerjasama pada perusahaan dalam dan luar negeri guna penyerapan maksimal, sehingga dengan berkurangnya angka pengangguran akan memberikan dampak	ketahanan bencana Pencapaian pembangunan tahun 2021 yang pada beberapa indikator kinerja belum tercapai sesuai dengan target dan masih dibawah capaian nasional antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,29% jika dibandingkan dengan nasional sebesar 3,69% hal ini lebih didasarkan pada struktur PDRB Sumatera Barat yang lebih dari 20% bergerak pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yang mana sektor ini hanya memberikan laju pertumbuhan sebesar 2,19%. Untuk itu maka dalam RPJMD terdapat salah satu program unggulan yakni mengalokasikan anggaran untuk sektor pertanian sebesar 10% dari total APBD yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sesuai dengan data BPS bahwa kemiskinan di	

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	pada angka kemiskinan.	Sumatera Barat lebih banyak berada pada daerah perdesaan dengan mayoritas bekerja pada sektor pertanian. Sehingga kebijakan anggaran 10% ini juga dapat secara langsung mengintervensi tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Capaian tingkat pengangguran tahun 2021 sebesar 6,52% menurun jika dibandingkan capaian di tahun 2020 sebesar 6,88% dan dibawah nasional pada tahun 2021 sebesar 6,49%. Hal ini diakibatkan adanya dampak pandemic yang membuat beberapa perusahaan/tempat kerja tutup sementara/permanet atau mengurangi jumlah tenaga kerja. Terkait dengann hal ini maka di tahun 2022 terdapat salah satu program unggulan yakni Penumbuhan Milenial Entrepreneur dan Women Entrepreneur yang melibatkan 15 Perangkat Daerah dalam pelaksanaan	

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		pencapaiannya. Sasaran dari program ini adalah penduduk berusia produktif, termasuk juga para lulusan-lulusan baru Perguruan Tinggi dan SMA/SMK. Untuk itu penyusunan APBD Tahun 2022 sd 2026 akan difokuskan terlebih dahulu pada pencapaian target-target Program Unggulan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor : 050 – 47 – 2021 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.	

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Selama Tahun 2023 dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh penghargaan sebagai 12 daerah terbaik pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan daerah oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui evaluasi kreatif dan komprehensif terhadap pembangunan daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun. Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan.

Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023



Kegiatan PPD ini sebelumnya dikenal dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN), yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Mulai tahun 2018, APN berubah nama menjadi PPD yang penilaiannya tidak hanya pada aspek perencanaan, namun juga meliputi pencapaian pelaksanaan pembangunan. Kegiatan PPD dikoordinasikan oleh Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI TA 2023

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DI DEKONSENTRASIKAN

1. Identifikasi Dekonsentrasi Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Alokasi Anggaran dan Realisasi Dekonsentrasi Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Dana
1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	967.604.000	936.892.770	96,83%	Kementeraian PPN/ Bappenas
2	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	274.920.000	274.622.402	99,89%	Kementerian Dalam Negeri

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat , 2023

i. Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi perencanaan pusat dan daerah dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Penyelenggaraan Dekonsentrasi ini juga diarahkan untuk (1) memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; (2) memperkuat koordinasi

kebijakan tata kelola data pembangunan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi pusat dan instansi daerah; dan (3) memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Dengan demikian diharapkan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan.

Provinsi Sumatera Barat memperoleh Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2023 dengan pagu dana sebesar Rp.967.604.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 936.892.770,- dengan ruang lingkup sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagai berikut :

1) Sasaran Penyelarasan RPJPN/RPJMN - RPJPD/RPJMD/RPD

Dengan fokus kegiatan :

- a. Knowledge Sharing Penyusunan RPJP Tahun 2025-2045, dengan kegiatan :
- b. Sosialisasi Penyusunan RPJP Tahun 2025-2045

2) Sasaran Penyelarasan RKP, Kebijakan Nasional meliputi Satu Data Indonesia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), dan Pengembangan Kawasan dengan RKPD

Dengan fokus kegiatan:

- a. Fasilitasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023
- b. Fasilitasi Temu Konsultasi
- c. Fasilitasi/Konsultasi Musrenbangnas
- d. Forum Satu Data Indonesia Provinsi Sumatera Barat
- e. Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat
- f. Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
- g. Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sumatera Barat.

3) Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi

ii. Dana Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri

Untuk kegiatan Dekonsentrasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dengan DIPA Nomor : SP DIPA - 010.04.3.484118/2023 dengan total dana Rp. 274.920.000,- terealisasi sebesar Rp. 274.622.402,-. Untuk kegiatan Dekonsentrasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan oleh unit kerja perangkat gubernur yang dilekatkan pada Satuan Kerja yang memiliki tugas dan fungsi bersesuaian, sebagai berikut: 1) Satuan Kerja Sekretariat Daerah pada Biro Pemerintahan selaku unit kerja bidang pemerintahan dan unit kerja bidang hukum dan organisasi; 2) Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unit kerja bidang hukum dan organisasi; 3) Satuan Kerja Bappeda Provinsi selaku unit kerja bidang perencanaan; dan 4) Satuan Kerja Inspektorat Daerah Provinsi selaku unit kerja bidang pengawasan.

Pada Satuan Kerja Bappeda Provinsi selaku unit kerja bidang perencanaan dengan keluaran :

1) Laporan dan rekomendasi usulan DAK Kabupaten/Kota

Dalam rangka meningkatkan kualitas usulan kegiatan DAK kabupaten dan kota, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan cara melakukan analisis dan verifikasi terhadap seluruh usulan kegiatan DAK sesuai dengan Permendagri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.

Tugas dan fungsi dalam pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota merupakan tugas dan kewenangan Ditjen Bangda dalam bentuk output pemetaan jenis data sebagai tahapan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan pelaporan di daerah agar berjalan efektif.

2) Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 91 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan implikasi terhadap kebijakan penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi Tugas Pembantuan pusat dan Tugas Pembantuan provinsi.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah

3.2 HAMBATAN/ PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Dana Dekonsentrasi Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

a. Permasalahan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Tahun 2023 ini antara lain :

1. DIPA terlambat diterima oleh Kab/Kota yang menerima dana Tugas Perbantuan
2. Kurangnya informasi yang disampaikan ke Provinsi terkait dengan alokasi Dana TP yang diterima oleh di Kab/Kota dari Kementerian terkait.
3. Usulan Provinsi terkait dengan DAK masih rendah, sehingga perlu perlu perbaikan dan penajaman usulan sesuai prioritas
4. Keterlambatan Juknis DAK yang diterima oleh Provinsi dan Kab/Kota untuk pelaksanaan kegiatan
5. Kegiatan Dekon APBN yang diterima belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan daerah seperti pembangunan sarana dan prasarana jalan, bangunan SD, Pustu, rumah ibadah dll di daerah eks transmigrasi yang mengalami banyak kerusakan.

Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Melakukan peran aktif dengan berkoordinasi dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan dan Kementerian terkait untuk mendapatkan informasi apakah DIPA sudah diterima atau belum
2. Melakukan koordinasi dengan Kanwil Perbendaharaan dan mendorong Kab/Kota untuk menyampaikan dan melaporkan alokasi serta pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana TP
3. Perlunya perbaikan dan penajaman usulan prioritas, memperhatikan batas minimal dan maksimal yang disesuaikan dengan satuan biaya yang ditetapkan.
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait agar keterlambatan Juknis yang diterima dapat diminimalkan
5. Melakukan inventarisasi dan mengajukan usulan ke Kementrian terkait

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2023 (LKPJ ATA 2023) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang sedangkan keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Bappeda Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Kritik dan saran sangat diharapkan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bappeda Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.